



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2024

**Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR BAGAN, DIAGRAM, GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR	1
I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Maksud dan Tujuan	4
3. Tugas dan Fungsi	5
4. Struktur Organisasi.....	5
5. Sistematika Penyajian	6
II. PERENCANAAN KINERJA	9
1. RPJMN 2020 - 2024	9
2. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	9
3. Perjanjian Kinerja.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
1. Pengukuran Capaian Kinerja	13
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	24
A. Stakeholder Perspective	24
B. Customer Perspective	37
C. Internal Process Perspective	38
D. Learning & Growth Perspective.....	50
3. Akuntabilitas Keuangan	79
IV. PENUTUP	80
1. Kesimpulan dan Saran	80
2. Tindak Lanjut ke Depan.....	81
LAMPIRAN.....	1
LAMPIRAN I	1
LAMPIRAN II	4
LAMPIRAN III	7
LAMPIRAN IV.....	10
LAMPIRAN V	12

LAMPIRAN VI.....	16
-------------------------	-----------

DAFTAR BAGAN, DIAGRAM, GRAFIK

Bagan

Bagan 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6
Bagan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	11

Diagram

Diagram 1 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA	29
Diagram 2 Realisasi Januari-Desember Tahun 2024: Berdasarkan Negara Asal	32
Diagram 3 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa	36

Grafik

Grafik 1 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor	17
Grafik 2 Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024	28
Grafik 3 Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2024	28
Grafik 4 Perkembangan Realisasi Investasi Periode 2019-2024	30
Grafik 5 Perkembangan Realisasi Investasi Periode 2019-2024: Per Triwulan	30
Grafik 6 Perkembangan Realisasi Investasi 2019-2024: Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11
Tabel 2 Kategori Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024	14
Tabel 3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024	14
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah I Tahun 2024	18
Tabel 5 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah II Tahun 2024	20
Tabel 6 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah III Tahun 2024	20
Tabel 7 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah IV Tahun 2024	21
Tabel 8 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah V Tahun 2024	21
Tabel 9 Target dan Realisasi PMA dan PMDN Investasi Per-Provinsi Tahun 2024	28
Tabel 10 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38
Tabel 11 Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya	39
Tabel 12 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko bagi Investasi Skala Besar	43
Tabel 13 Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya	49
Tabel 14 Pemantauan Proyek Investasi dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi di 38 Provinsi	51
Tabel 15 Capaian Realisasi Dana Dekonsentrasi TA 2024	53
Tabel 16 Target Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran DAK Non Fisik 2024	53

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 2024 secara tepat waktu. LAKIN Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Penyusunan LAKIN ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Mengacu pada peraturan tersebut, maka Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perlu menyusun laporan kinerja yang berisi capaian atas target dan sasaran strategis yang telah digariskan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin). LAKIN 2024 disajikan dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja seluruh direktorat yang berada dibawah unit kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perkin 2024. Dalam hal ini, Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Wilayah I, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung (7 Provinsi).
2. Direktorat Wilayah II, meliputi Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (7 Provinsi).

3. Direktorat Wilayah III, meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara (7 Provinsi).
4. Direktorat Wilayah IV, Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan (10 Provinsi).
5. Direktorat Wilayah V, meliputi Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya (7 Provinsi).

Seluruh program yang dilakukan selama periode 2024 dirangkum dalam sebuah laporan yang mendeskripsikan secara detail mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan LAKIN tersebut diharapkan adanya optimalisasi dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami mengharapkan kiranya LAKIN 2024 ini dapat menjadi media transparansi dan pertanggungjawaban yang bermanfaat bagi semua pihak serta sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Jakarta, 31 Januari 2025

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Edy Junaedi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif dan berkembangnya daya saing Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di berbagai sektor perekonomian di Indonesia.

Selanjutnya, dalam menjalankan program strategis yang telah dicanangkan tahun 2024, unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020 - 2024. Dalam Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020 - 2024 dijabarkan mengenai target dan indikator sasaran yang diperinci per tahun beserta rencana alokasi pembiayaannya sebagai penjabaran dari target RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020 - 2024 terdapat sasaran dan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM antara

lain terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat *investment grade*. Meskipun ditengah dinamika politik dalam negeri dan ketidakpastian global, namun hal tersebut tidak menghentikan langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tetap mengusahakan peningkatan pencapaian realisasi investasi sesuai target yang ditetapkan.

Selama periode tahun 2024 Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah banyak melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia yang menggunakan anggaran APBN, sehingga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja terhadap *stakeholders*.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai Unit Eselon I, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diwajibkan untuk:

- a. Menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) pada setiap akhir tahun;
- b. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan LAKIN 2024 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dan wewenang yang telah diberikan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIN 2024 unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program kerja untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) 2024.

Adapun tujuan penyusunan LAKIN ini adalah untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi capaian kinerja atas target Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Selanjutnya atas dasar hasil evaluasi kinerja atas target tersebut dapat diformulasikan suatu rekomendasi bagi unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas pelaksanaan program kerja di periode mendatang sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dan lebih tepat sasaran.

3. Tugas dan Fungsi

Unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

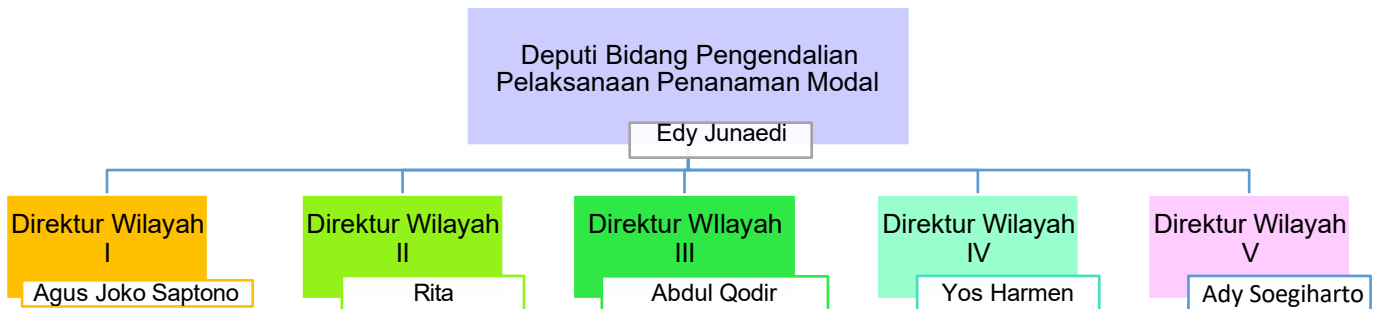
Selain itu, unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki fungsi :

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pelaksanaan pengawasan administratif dan/atau fisik realisasi penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, kinerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terbagi berdasarkan 5 (lima) Direktorat/Eselon II dengan bagan organisasi sebagai berikut :

Bagan 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Pada setiap Direktorat Wilayah memiliki kewenangan dalam menangani bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal pada provinsi tertentu. Wilayah kerja masing-masing direktorat meliputi :

1. Direktorat Wilayah I meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung;
2. Direktorat Wilayah II meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
3. Direktorat Wilayah III meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara;
4. Direktorat Wilayah IV meliputi 10 provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
5. Direktorat Wilayah V meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

5. Sistematika Penyajian

LAKIN disajikan dengan sarana yang dapat mendeskripsikan kegiatan dan pelaksanaan program unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal selama periode 2024, sehingga berbagai pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami tentang capaian kinerja selama masa kerja tersebut. Dalam hal ini Perkin 2024 menjadi rujukan dan tolok ukur atas keberhasilan unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan gambaran tentang capaian kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai wujud (entitas) akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon I selama Tahun 2024. Capaian Kinerja diperoleh berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target kinerja, dimana target kinerja merupakan Perjanjian Kinerja yang disampaikan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Analisis capaian realisasi kinerja dengan rencana target kinerja tersebut dapat menghasilkan sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di masa mendatang.

Sistematika penyajian LAKIN Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut, isi LAKIN digariskan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020 - 2024.
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

II. PERENCANAAN KINERJA

Tahap perencanaan merupakan proses yang menjadi kunci penentu keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan termasuk didalamnya kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dalam melakukan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya berpedoman pada dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. RPJMN 2020 - 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Bentuk dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 - 2024 yaitu:

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Visi Indonesia :
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.*”

2. Rencana Strategis 2020 - 2024

RPJMN Tahun 2020 - 2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan di wujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas

dan Berkeadilan.” Dimana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor dan Daya Saing Perekonomian.”

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024.

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sejalan dengan arahan kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu (1) peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, (2) peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek dari Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020 - 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk arah kebijakan pertama adalah “Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal” dan arah kebijakan kedua adalah “Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar”.

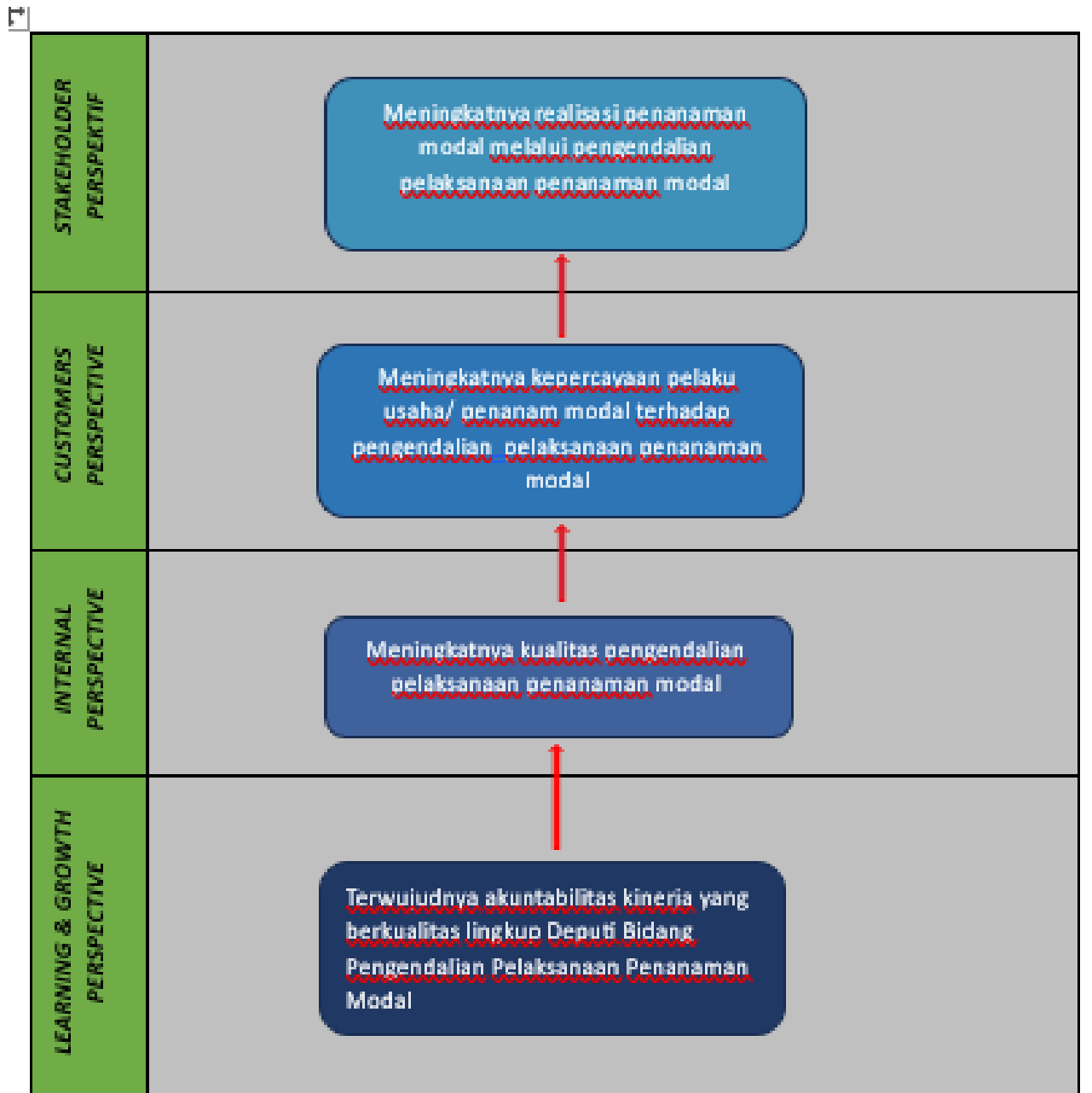
Adapun target realisasi penanaman modal yang ditetapkan untuk Tahun 2024 sesuai Renstra 2020 - 2024 sebesar Rp 1.239,3 Triliun, namun Presiden RI Bapak Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk meningkatkan target realisasi investasi Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 1.650,0 Triliun.

3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam program tersebut, dinilai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai berikut :

Bagan 2 Bagan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024



Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	6	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	79
		7	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar (%)	75
		8	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		9	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70
		10	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		11	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100
		12	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala dalam pelaksanaannya (%)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		13	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	14	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (skala)	4
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86
		17	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5

Adapun pagu anggaran APBN Tahun 2024 untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal yang dialokasikan Tahun 2024 sebagaimana APBN-P perubahan terakhir untuk Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp 108.766.452.000.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perkin dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan pengkategorian capaian kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja selama tahun 2024. Adapun pengkategorian capaian kinerja untuk Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kategori Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Capaian kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3	1.714,2
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1	721,3
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7	52,2
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1	47,5
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku	5	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal	3,4	3,5

	usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal		atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)		
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	6	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	79	106,15
		7	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar (%)	75	106,29
		8	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70	100,00
		9	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70	123,33
		10	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70	77,78
		11	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100	100,00
		12	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala dalam pelaksanaannya (%)	75	63,15
		13	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80	123,47
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	14	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat/ nilai)	80	71,10

		15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (skala)	4	4
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86	83,75
		17	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5	0

Sesuai dengan RKP 2024 target realisasi investasi sebesar Rp 1.239,3 Triliun, untuk capaian Rp 1.714,2 Triliun yang berarti capaian sebesar 138,3% dari target. Sementara untuk mendorong pertumbuhan perekonomian diatas 5% dan menjadikan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian, Presiden menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp 1.650 Triliun, atau capaian 103,9% dari target yang ditetapkan oleh Presiden.

Secara total, nilai realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 721,3 Triliun (42,1% dari realisasi investasi periode Januari - Desember 2024). Jika dirinci kepada PMA/PMDN, nilai realisasi investasi PMA untuk sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 527,0 Triliun (58,5% dari realisasi investasi PMA). Sedangkan untuk realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) pada PMDN tercatat sebesar Rp 194,3 Triliun (23,9% dari realisasi investasi PMDN).

Pada Grafik 1 dibawah ini dapat dilihat bahwa 5 besar realisasi investasi PMA & PMDN berdasarkan subsektor Tahun 2020 - 2024 didominasi oleh subsektor Industri Pengolahan (*Manufacturing*), dilanjutkan subsektor Infrastruktur dan Jasa.

Grafik 1 Tren Realisasi Investasi Berdasarkan Subsektor Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Jasa Rp 458,6 T - (55,5%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 442,4 T (49,1%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 497,7 T - (41,2%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 596,3 T - (42,0%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 721,2 T - (42,1%)
Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 272,9 T - (33,0%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 325,4 T - (36,1%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 496,9 T - (41,2%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 567,1 T - (40,0%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 695,6 T - (40,6%)
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 49,1 T - (5,9%)	Pertambangan Rp 81,2 T - (9,0%)	Pertambangan Rp 136,4 T - (11,3%)	Pertambangan Rp 156,5 T - (11,0%)	Pertambangan Rp 184,7 T - (10,7%)
Pertambangan Rp 42,6 T - (5,2%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 43,3 T - (4,8%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 64,6 T - (5,3%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 71,7 T - (5,1%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 72,9 T - (4,3%)
Kehutanan Rp 1,8 T - (0,2%)	Kehutanan Rp 7,5 T - (0,8%)	Kehutanan Rp 10,0 T - (0,8%)	Kehutanan Rp 24,5 T - (1,7%)	Kehutanan Rp 34,7 T - (2,0%)
Perikanan Rp 1,3 T - (0,2%)	Perikanan Rp 1,3 T - (0,1%)	Perikanan Rp 1,7 T - (0,1%)	Perikanan Rp 2,5 T - (0,2%)	Perikanan Rp 5,1 T - (0,3%)

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah I Tahun 2024

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH I
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I (Rp Triliun)	223,1	283,57
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (indeks)	3,2	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah I (%)	70	100,00
		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha	75	106,25

			berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah I (%)		
		5	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70	100,00
		6	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70	123,33
		7	Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70	100,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I	8	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	77
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah I (skala)	4	4
		10	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2024 (%)	5	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 : Direktorat Wilayah I

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	26.046.861.000	25.785.580.321
	Total	26.046.861.000	25.785.580.321

Tabel 5 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah II Tahun 2024
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT WILAYAH II
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II (Rp Triliun)	266,4	404,94
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (indeks)	3,4	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah II (%)	85	100,00
		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah II (%)	75	100,00
		5	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100	100,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II	8	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	77
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah II (skala)	4	4
		10	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2024 (%)	5	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 : Direktorat Wilayah II

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
----	----------	---------------	----------------

1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	17.236.342.000	17.080.344.260
Total		17.236.342.000	17.080.344.260

Tabel 6 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah III Tahun 2024

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH III
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III (Rp Triliun)	359,4	597,88
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (indeks)	3,4	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah III (%)	85	123,08
		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah III (%)	75	103,33
		5	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala di Wilayah Barat dalam pelaksanaannya (%)	80	100,00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	80	77

			Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)		
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah III (skala)	4	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah III TA 2024 (%)	5	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 : Direktorat Wilayah III

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	17.703.719.000	17.419.581.144
	Total	17.703.719.000	17.419.581.144

Tabel 7 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah IV Tahun 2024

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH IV
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Rp Triliun)	241,7	345,65
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (indeks)	3,4	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah IV (%)	70	107,69

		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah IV (%)	75	118,52
		5	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80	
		6	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala di Wilayah Timur dalam pelaksanaannya (%)	70	26,32
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV	7	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	77
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah IV (skala)	4	4
		9	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah IV TA 2024 (%)	5	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 : Direktorat Wilayah IV

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	20.300.097.000	20.152.924.506
	Total	20.300.097.000	20.152.924.506

Tabel 8 Capaian Kinerja Direktorat Wilayah V Tahun 2024

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH V
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V (Rp Triliun)	148,7	82,18
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (indeks)	3,6	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah V (%)	100	100,00
		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah V (%)	100	103,33
		5	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70	77,78
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	77
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah V (skala)	4	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah V TA 2024 (%)	5	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 : Direktorat Wilayah V

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	27.479.433.000	27.053.191.844
	Total	27.479.433.000	27.053.191.844

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020 - 2024 telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahunan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Penjelasan capaian prestasi kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sepanjang Tahun 2024 sebagaimana pada uraian berikut :

A. Stakeholder Perspective

1. Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil.

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal maka dilakukan kegiatan pemantauan berbagai proyek-proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pada Triwulan II Tahun 2023, pelaporan LKPM secara resmi telah dapat dilaporkan melalui system oss.go.id, secara *Single Sign On* (SSO), dimana pelaporan LKPM dilakukan berkala

setiap triwulan, yakni Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun bagi yang sudah melakukan kegiatan produksi/operasi.

Dalam menghimpun LKPM *Online* dari seluruh penanam modal (PMDN/PMA) di Indonesia, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar realisasi investasi yang telah ditargetkan bisa tercapai. Target nilai realisasi investasi Tahun 2024 yang ditetapkan di dalam Renstra BKPM 2020 - 2024 merupakan target bersama yang harus dicapai oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan sinergis antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen investasi masing-masing daerah maka ditetapkan target nilai realisasi investasi untuk Tahun 2024 pada setiap provinsi yang dihitung berdasarkan perbandingan potensi rencana investasi kumulatif (Januari 2019 s.d. Desember 2024) per provinsi terhadap target realisasi investasi nasional pada Tahun 2024 (Rp 1.650 Triliun). Adapun target realisasi investasi per provinsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 9 Target dan Realisasi PMA dan PMDN Investasi Per-Provinsi Tahun 2024

- a. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Sumatera Utara	58,93	48,27	81,91
2	Aceh	9,43	9,47	100,40
3	Sumatera Barat	9,43	9,69	102,80
4	Kepulauan Riau	35,36	47,26	133,66
5	Riau	106,07	88,30	83,24
6	Sumatera Selatan	64,82	70,92	109,41
7	Lampung	12,96	9,66	74,54
Total		297,00	283,57	95,48

- b. Wilayah Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	198,68	241,85	121,73
2	Kalimantan Selatan	19,11	24,85	130,04
3	Kalimantan Barat	27,04	24,66	91,18
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,32	4,16	125,36
5	Kalimantan Timur	76,02	76,34	100,41
6	Kalimantan Tengah	18,96	21,52	113,48
7	Jambi	11,62	11,57	99,58
Total		354,75	404,94	114,15

- c. Wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Jawa Barat	183,62	251,14	136,77
2	Banten	81,02	105,63	130,37
3	Jawa Tengah	64,16	68,67	107,04
4	Sulawesi Utara	5,22	7,47	143,09
5	Sulawesi Tengah	109,05	139,88	128,27
6	Sulawesi Selatan	14,21	14,04	98,78
7	Sulawesi Tenggara	21,22	11,05	52,09
Total		478,50	597,88	124,95

- d. Wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Jawa Timur	148,85	147,33	98,98
2	Nusa Tenggara Barat	26,95	53,15	197,22
3	Bali	16,23	36,52	225,00
4	Nusa Tenggara Timur	6,26	4,22	67,38
	Total Papua	28,36	26,04	540,50
5	Papua	0,62	1,11	178,29
6	Papua Pegunungan	0,05	0,08	164,03
7	Papua Tengah	25,82	22,80	88,29
8	Papua Selatan	1,87	2,05	109,89

9	Maluku	2,38	3,38	142,04
10	Maluku Utara	92,72	75,02	80,91
Total		321,75	345,65	107,43

e. Wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya

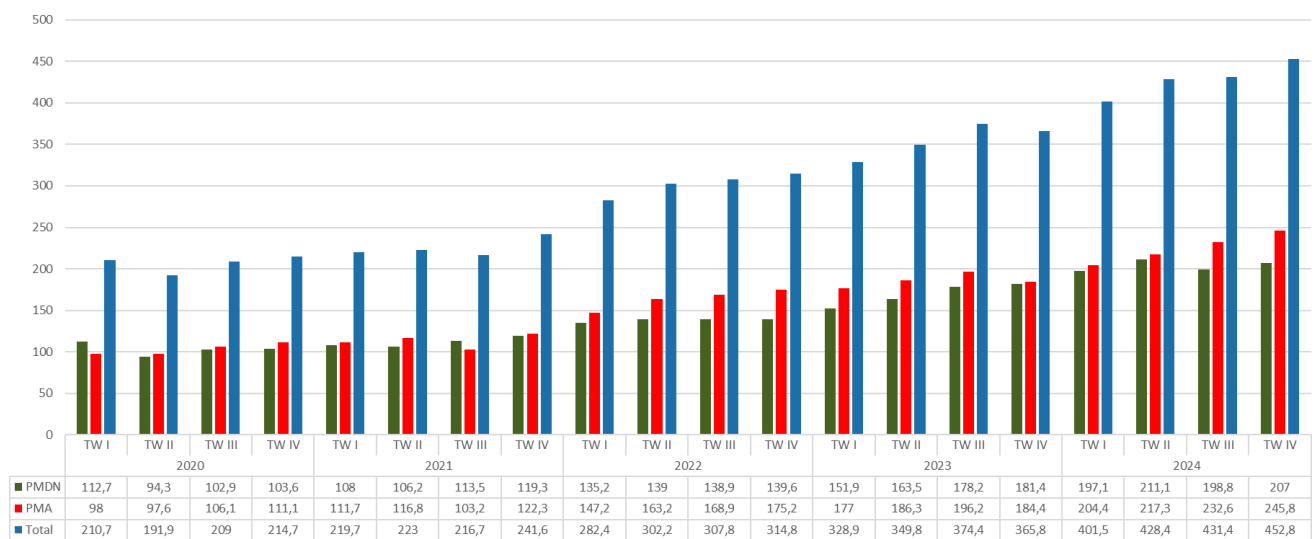
No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Kepulauan Bangka Belitung	50,11	17,26	34,44
2	Bengkulu	45,52	9,28	20,40
3	Kalimantan Utara	70,65	32,14	45,49
4	Gorontalo	12,92	4,53	35,05
5	Sulawesi Barat	7,92	2,93	36,95
6	Papua Barat	4,84	13,04	269,39
7	Papua Barat Daya	6,04	3,01	49,83
Total		198,00	82,18	41,51

Pencapaian prestasi kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada periode Januari - Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada capaian nilai realisasi penanaman modal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.714,2 Triliun atau sekitar 103,89% dari target yang ditetapkan (Rp 1.650,0 Triliun) yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 814,0 Triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 900,2 Triliun. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2023 maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 20,8% di mana capaian realisasi penanaman modal pada Januari - Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.418,9 Triliun. Capaian tersebut merupakan prestasi kinerja terhadap indikator kinerja jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau pada Tahun 2024.

Capaian nilai realisasi penanaman modal Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengumpulan LKPM sebanyak 312.573 proyek yang terdiri dari 238.182 proyek PMDN dan 74.391 proyek PMA. Seiring dengan peningkatan capaian realisasi investasi yang signifikan, jumlah LKPM *Online* yang berhasil dihimpun Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 menurun sebesar 8,01% dari Tahun 2023 sebanyak 337.620 proyek. Jumlah proyek PMDN yang terhimpun pada Tahun 2024 tersebut menurun sebesar 11,98% dari Tahun 2023 sebesar 266.722 proyek dan jumlah proyek PMA yang terhimpun pada Tahun 2024 meningkat sebesar 4,70% dari Tahun 2023 sebanyak 70.898 proyek.

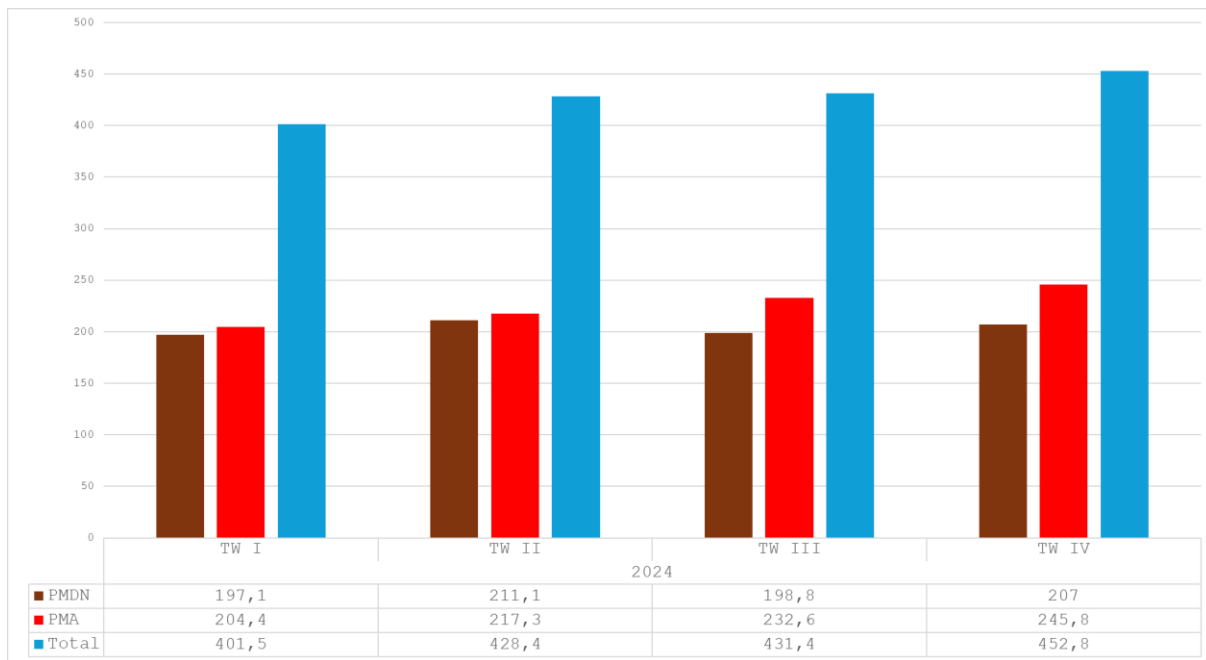
Capaian nilai realisasi investasi pada Tahun 2024 merupakan akumulasi nilai realisasi investasi dari setiap periode pelaporan (triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2024 nilai realisasi investasi mencapai Rp 401,5 Triliun, Triwulan II (April - Juni) sebesar Rp 428,4 Triliun, Triwulan III (Juli - September) mencapai sebesar Rp 431,4 Triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober - Desember) sebesar Rp. 452,8 Triliun. Perkembangan realisasi investasi pada setiap periode pelaporan dapat dilihat pada Grafik 1 berikut:

Grafik 2 Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024



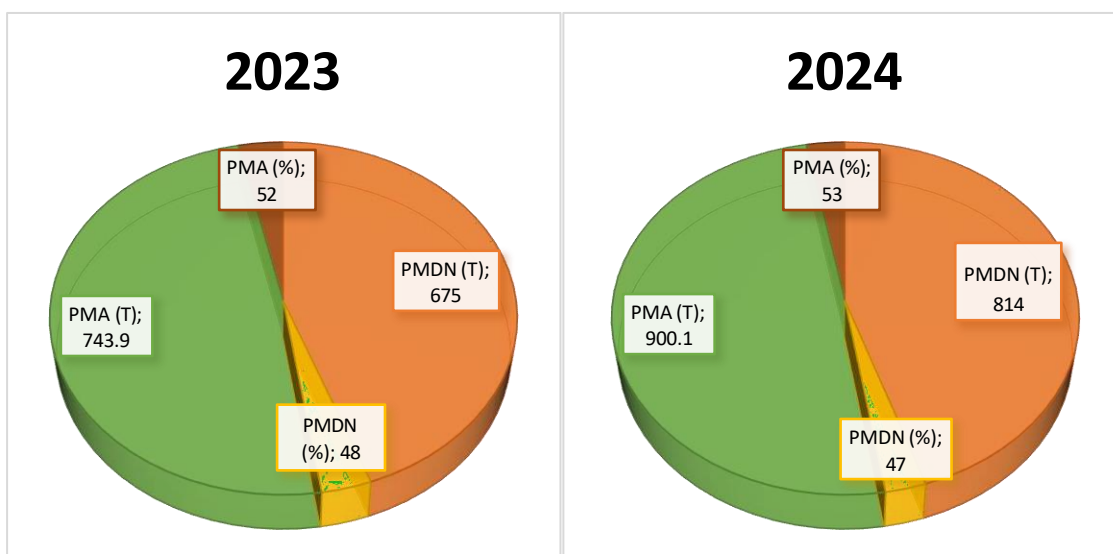
Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu pada Tahun 2023, total capaian nilai realisasi investasi Tahun 2024 merupakan capaian nilai investasi yang meningkat 20,8% sebesar Rp 1.714,2 Triliun dari periode Tahun 2023 (Rp 1.418,9 Triliun). Pada Grafik 2 dibawah ini dapat dilihat peningkatan realisasi investasi Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 pada setiap periode pelaporan (per-triwulan).

Grafik 3 Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2024



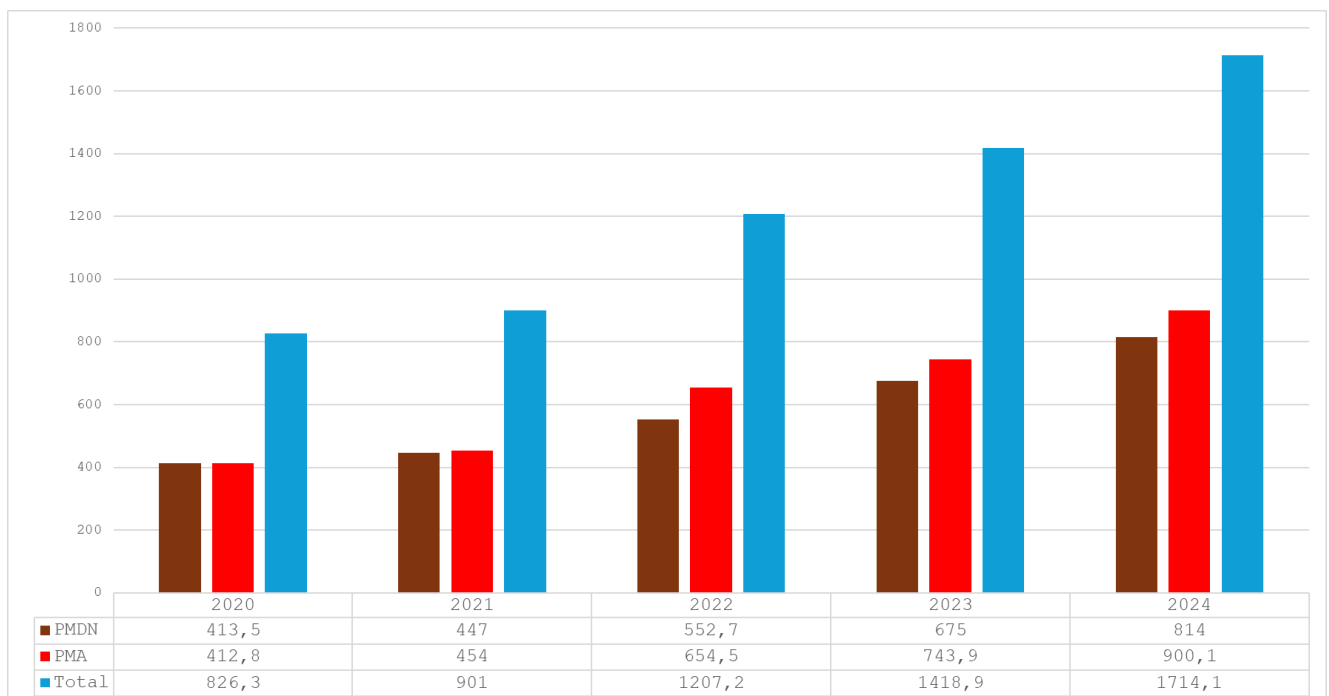
Capaian realisasi PMDN pada Tahun 2024 juga meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Realisasi investasi PMDN pada Tahun 2024 mencapai Rp. 814 Triliun atau mencapai 47% dari total realisasi investasi secara nasional (PMDN dan PMA). Nilai realisasi investasi PMDN tersebut meningkat 20,59% dari Tahun 2023 (Rp. 675 Triliun). Perbandingan realisasi PMDN dan PMA pada Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Diagram 1 sebagai berikut:

Diagram 1 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA



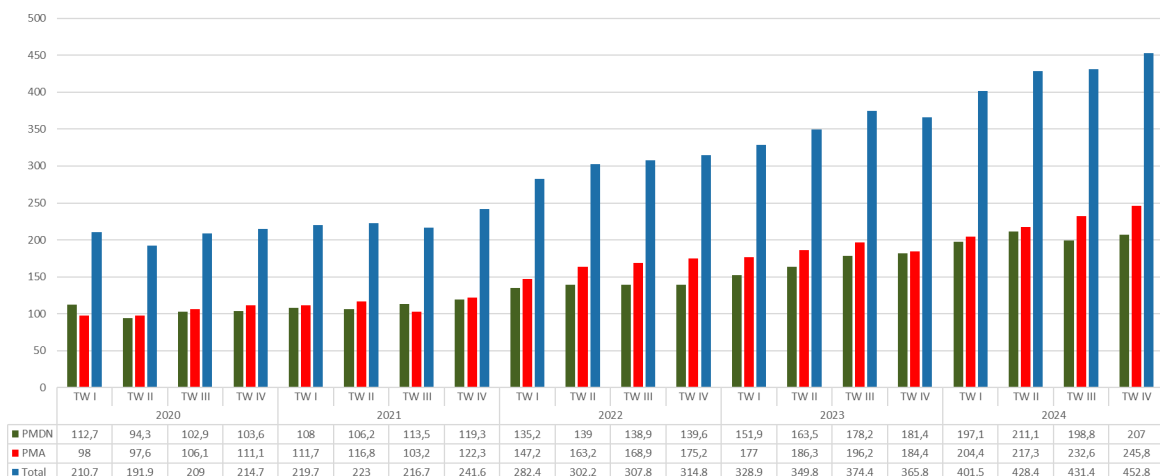
Capaian nilai realisasi penanaman modal sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 mencapai Rp 826,3 Triliun. Realisasi investasi pada Tahun 2021 mencapai 901 Triliun atau meningkat 9,0% dari realisasi Tahun 2020. Realisasi investasi pada Tahun 2022 mencapai 1207,2 Triliun atau meningkat 46% dari realisasi Tahun 2020. Realisasi investasi pada Tahun 2023 mencapai Rp 1418,9 Triliun atau meningkat 18% dari realisasi Tahun 2022. Realisasi investasi pada Tahun 2024 mencapai Rp 1714,1 Triliun atau meningkat 21% dari realisasi Tahun 2023. Capaian Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3 dibawah ini.

Grafik 4 Perkembangan Realisasi Investasi Periode 2020 – 2024



Apabila capaian nilai realisasi investasi dilihat per-periode pelaporan sejak Tahun 2020 maka dapat dilihat bahwa capaian realisasi investasi bergerak positif pada setiap periode tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4 dibawah ini.

Grafik 5 Perkembangan Realisasi Investasi Periode 2020 - 2024: Per Triwulan



Berdasarkan data realisasi investasi Tahun 2020 sampai dengan 2024, setiap triwulan terlihat kenaikan angka realisasi yang cukup baik, meskipun terdapat sedikit penurunan pada pertengahan Tahun 2020 dan 2021 dimana pada waktu itu terjadi pandemi Covid-19 yang lumayan mempengaruhi laju perekonomian Indonesia, hal inipun juga berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Namun perekonomian Indonesia cepat kembali pulih, dimana Tahun 2022 merupakan Tahun pemulihan ekonomi Indonesia setelah diterpa dampak pandemi sehingga terlihat capaian investasi meningkat dengan sangat signifikan baik perkembangan PMDN maupun PMA. Hal tersebut menunjukkan minat investor, baik investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tinggi.

Prestasi kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap indikator kinerja jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau pada Tahun 2024 merupakan keberhasilan bersama antara pusat dan daerah dalam menghimpun LKPM. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik antara unit Direktorat Wilayah sebagai unit kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan setiap daerah yang berada dibawah wilayah pemantauannya. Selain itu ada beberapa catatan penting terkait realisasi kinerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024, seperti penanganan permasalahan investasi, mendorong kemitraan usaha besar dengan UMKM, membangun kesempatan berusaha melalui kemitraan.

Dari capaian realisasi investasi Tahun 2024 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi PMDN

Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 120,1 triliun); Pertambangan (Rp 106,9 triliun); Jasa Lainnya (Rp 76,5 triliun); Industri Makanan (Rp 65,9 triliun); serta Perdagangan dan Reparasi (Rp 65,3 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 194,3 triliun atau 23,9% dari total PMDN.

Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Rp 128,4 triliun); Jawa Barat (Rp 101,6 triliun); Jawa Timur (Rp 92,4 triliun); Riau (Rp 61,1 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 55,1 triliun)

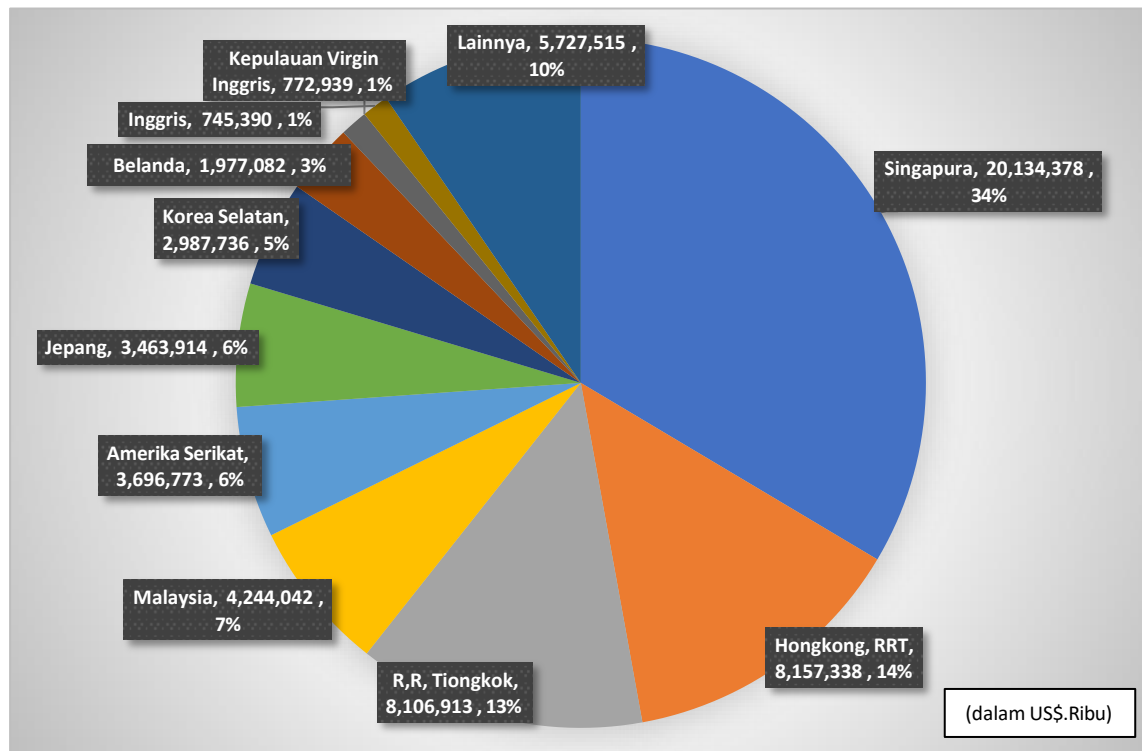
2. Realisasi Investasi PMA

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US\$ 13,6 miliar); Pertambangan (US\$ 5,2 miliar); Industri Kertas dan Percetakan (US\$ 4,8 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US\$ 4,7 miliar); serta Industri Kimia Dan Farmasi (US\$ 4,1 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar US\$ 35,1 miliar atau 58,5 % dari total PMA.

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US\$ 10,0 miliar); Sulawesi Tengah (US\$ 9,0 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US\$ 7,6 miliar); Maluku Utara (US\$ 4,4 miliar); dan Banten (US\$ 3,9 miliar).

Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US\$ 20,1 miliar); Hongkong, RRT (US\$ 8,2 miliar); R.R. Tiongkok (US\$ 8,1 miliar); Malaysia (US\$ 4,2 miliar); dan Amerika Serikat (US\$ 3,7 miliar).

Diagram 2 Realisasi Januari-Desember Tahun 2024 : Berdasarkan Negara Asal



3. Sebaran Lokasi Proyek

Pada periode Januari - Desember 2024, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 818,8 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2023, terjadi peningkatan investasi di Jawa sebesar 19,0% dan di Luar Jawa sebesar 22,5%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari - Desember 2024 mencapai 2.456.130 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 1.473.909 orang (60,0%) dan proyek PMA sebanyak 982.221 orang (40,0%).

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 adalah:

- Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 321,7 triliun (18,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 187,4 triliun dan PMA sebesar US\$ 9,0 miliar.
- Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 818,8 triliun (47,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 406,9 triliun dan PMA sebesar US\$ 27,5 miliar.
- Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 179,5 triliun (10,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 114,2 triliun dan PMA sebesar US\$ 4,4 miliar.

- d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 179,9 triliun (10,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 31,2 triliun dan PMA sebesar US\$ 9,9 miliar.
- e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 93,9 triliun (5,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 58,3 triliun dan PMA sebesar US\$ 2,4 miliar.
- f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 120,5 triliun (7,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 15,9 triliun dan PMA sebesar US\$ 7,0 miliar.

2. Nilai realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

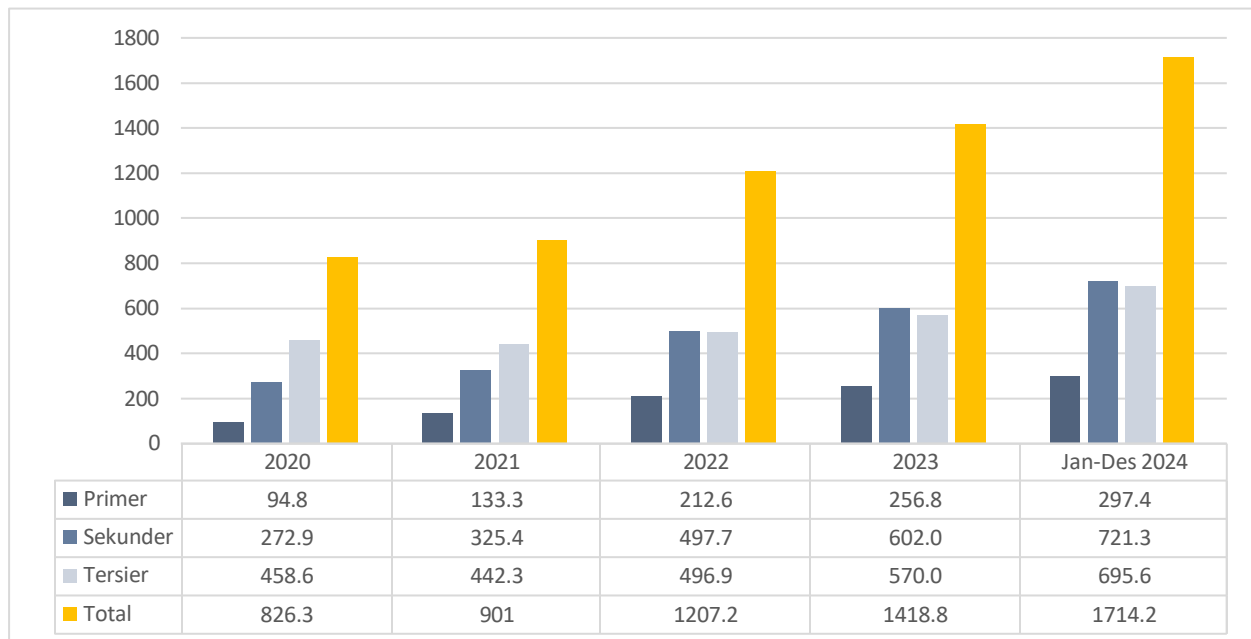
Nilai realisasi penanaman modal sekunder adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil.

Penanaman modal sektor sekunder meliputi :

- Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya
- Industri makanan
- Industri kimia dan farmasi
- Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
- Industri kertas dan percetakan
- Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam
- Industri tekstil
- Industri karet dan plastik
- Industri mineral non logam
- Industri barang dari kulit dan alas kaki
- Industri kayu
- Industri lainnya

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 194,3 Triliun atau 24% dari total PMDN, sedangkan untuk PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 527 Triliun atau 65 % dari total PMA. Sehingga total kontribusi sektor industri pada Tahun ini mencapai Rp 721,3 Triliun dari target Perkin sebesar Rp 646,1 Triliun, dan mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya sebesar Rp 602 Triliun sebagaimana tercantum pada Grafik 5.

Grafik 6 Perkembangan Realisasi Investasi 2019 - 2024: Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier



3. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan Kawasan industri dan Kawasan Pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan salah satu upaya untuk meningkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi penanaman modal.

Pada periode Januari - Desember Tahun 2024, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp. 818,8 triliun (47,8%) dan realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,4 triliun (52,2%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2023 realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar Rp. 730,8 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar 23 %. Grafik persebaran

realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Diagram 3 dibawah ini.

Diagram 3 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa Dan Jawa

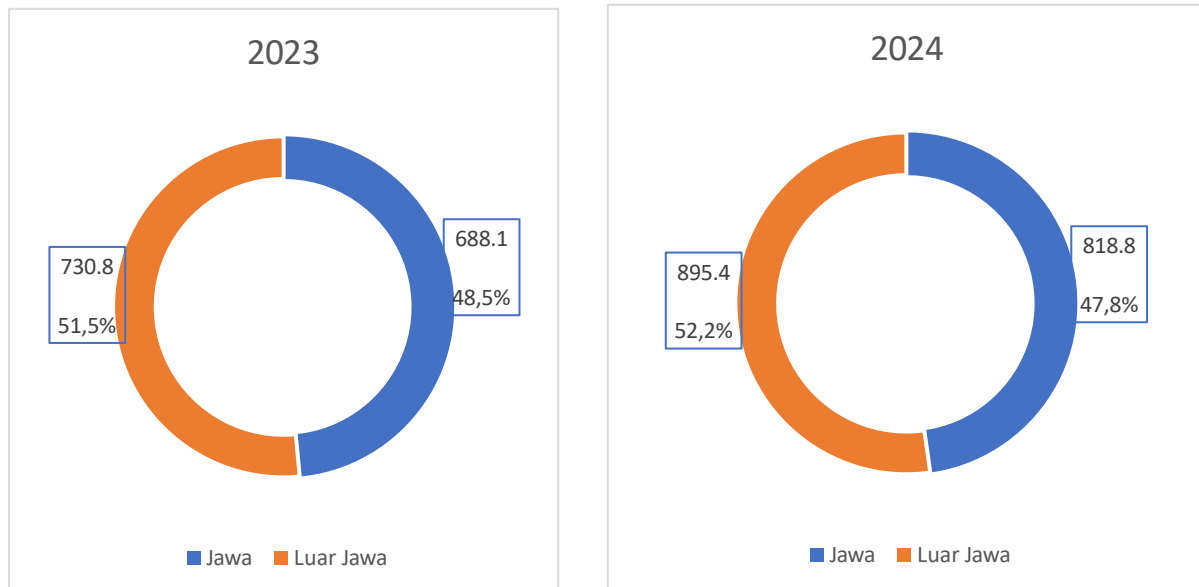


Diagram 3 di atas memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukan hasil yang positif (kenaikan sebesar 23 % dari Tahun sebelumnya), dari hasil ini bahwa realisasi Luar Jawa sebesar 52,2% melebihi dari target Perkin 2024 sebesar 51,7%.

4. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Data realisasi investasi pada Tahun 2024 belum mencakup realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK). Adapun rencana investasi UMK pada Tahun 2024 sebesar Rp. 261,9 Triliun, dengan rincian Usaha Mikro sebesar Rp. 146,8 Triliun dan Usaha Kecil sebesar Rp. 115,1 Triliun. Sedangkan total proyek UMK pada Tahun 2024 sebanyak 4.499.349 proyek, dengan rincian Usaha Mikro sebanyak 4.072.861 dan Usaha Kecil sebanyak 426.488 proyek.

Rasio realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM Tahun 2024 ditargetkan sebesar 53,1%. Hal ini berarti target rasio realisasi PMDN dalam Perkin Tahun 2024 PMDN tidak tercapai dikarenakan rasionya sebesar 47,5%, namun bukan berarti capaian realisasi PMDN pada Tahun 2024 menurun. Peningkatan sebaran investasi perusahaan PMA di Luar Pulau Jawa yang melonjak cukup tinggi tentu saja mempengaruhi hasil dari rasio realisasi PMDN. Grafik realisasi investasi PMDN dan PMA pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Diagram 1 di atas.

B. Customer Perspective

5. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan pengguna layanan berupa angka. Dalam hal ini pengguna layanan di Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu Perusahaan, Kementerian/Lembaga, Stakeholder, dan Umum.

Survei dilakukan terhadap minimal 100 responden atas kegiatan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui *link* simantab.bkpm.go.id/survei/Survey_Dalak_2024. Kriteria pengendalian pelaksanaan yang disurvei diukur dengan memberikan 9 pertanyaan untuk 9 ruang lingkup unsur layanan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara lain:

1. Ruang Lingkup Persyaratan

2. Ruang Lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Ruang Lingkup Waktu Penyelesaian
4. Ruang Lingkup Biaya/Tarif
5. Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana
7. Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana
8. Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana
9. Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024 ini diperoleh nilai sebesar 3,5 dari target 3,4 (skala 4) dari 106 responden sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	Indeks (Skala 4)
1.	Persyaratan Pelayanan	3,45
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,46
3.	Waktu Pelayanan/Penyelesaian	3,42
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,52
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,37
6.	Kompetensi Pelaksana	3,51
7.	Perilaku Pelaksana	3,46
8.	Sarana dan Prasarana	3,49
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,48
Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang		3,5

C. Internal Process Perspective

6. Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Kegiatan fasilitasi permasalahan perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 meliputi kriteria:

- memiliki permasalahan yang terkendala kurang dari 1 tahun;
- memiliki nilai rencana investasi belum dapat direalisasikan; dan/atau
- tidak bernilai strategis.

Adapun persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi permasalahan perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya oleh Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 adalah sebesar 106,15% dari target 79% sebagaimana rincian Tabel 11.

Tabel 11 Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya

Direktorat	Kegiatan Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya		%
	Target (%)	Realisasi (%)	
Direktorat Wilayah I	70	100,00	142,86
Direktorat Wilayah II	85	100,00	117,65
Direktorat Wilayah III	85	123,08	144,80
Direktorat Wilayah IV	70	107,69	153,84
Direktorat Wilayah V	70	100,00	142,86
Deputi Dalak	79	106,15	140,40

7. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko bagi Investasi Skala Besar

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga tertib administrasi bagi penanam modal serta mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka salah satu tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi penanaman modal dengan skala besar.

Pengawasan berusaha berbasis risiko dimaksud dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait antara lain Kementerian/Lembaga sesuai sektor, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

- 1) Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki
- 2) Adanya indikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan usaha
- 3) Pemantauan pemberian fasilitas penanaman modal

Kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko yang dilakukan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 melalui unit kerja Direktorat Wilayah I, II, III, IV, dan V dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 12 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko bagi Investasi Skala Besar

Direktorat	Kepatuhan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko		%
	Target (%)	Realisasi (%)	
Direktorat Wilayah I	75	106,25	141,67
Direktorat Wilayah II	75	100,00	133,33
Direktorat Wilayah III	75	103,33	137,73
Direktorat Wilayah IV	75	118,52	158,03
Direktorat Wilayah V	100	103,33	103,33
Total	80	106,29	134,82

Berdasarkan Tabel 12 di atas, capaian kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar seluruhnya telah tercapai bahkan melampaui target, Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan bahwasanya pelaku usaha sudah cukup tertib baik secara administrasi perizinan berusaha dan pelaksanaan ketentuan peraturan penanaman modal yang berlaku. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap periode.

8. Persentase Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi kendala terhambatnya keberlanjutan realisasi investasi yaitu antara lain: permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, gangguan keamanan. Untuk mengatasi hal dimaksud, Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan layanan pendampingan terhadap badan usaha yang mengalami permasalahan terkait keberlanjutan investasinya, hal ini juga melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait.

Perusahaan yang mengajukan permohonan layanan pendampingan terkait permasalahannya melalui surat resmi kepada Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perusahaan yang mengajukan permohonan layanan pendampingan direspon sesuai dengan lokasi proyek yang wilayahnya terbagi menjadi :

1. Wilayah I : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung;
2. Wilayah II : Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
3. Wilayah III : Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara;
4. Wilayah IV : Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan
5. Wilayah V : Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Adapun kegiatan layanan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Wilayah sebagai unit kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini:

Tabel 13 Persentase Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Direktorat	Layanan Pendampingan		%
	Target (%)	Realisasi (%)	
Direktorat Wilayah I	70	100,00	142,86
Total	70	100,00	142,86

Pada Tahun 2024 Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan layanan pendampingan penyelesaian permasalahan penanaman modal terhadap 40 perusahaan yang berarti tercapai 100% dari target 40 perusahaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan pelayanan *aftercare* dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu apabila ada investor

yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan berusaha. Kegiatan ini melibatkan para *stakeholders* terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang diantaranya adalah permasalahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan permasalahan lahan.

Kinerja tersebut merupakan wujud kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan DPMPTSP di 38 provinsi.

9. Persentase Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi

Kegiatan Eksekusi Realisasi Investasi bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal (ERIFAS) dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan penerima fasilitas penanaman modal, sehingga perusahaan dimaksud dapat segera merealisasikan rencana investasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah diperoleh.

Perusahaan penerima fasilitas penanaman modal merupakan salah satu target yang penting dalam rangka pencapaian realisasi investasi, dikarenakan perusahaan tersebut rata-rata memiliki nilai rencana investasi yang besar, serta memiliki komitmen realisasi yang lebih nyata. Pemberian fasilitas penanaman modal diharapkan dapat lebih menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Adapun fasilitas penanaman modal kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menjadi target ERIFAS Tahun 2024 yaitu :

1. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau *Tax Holiday* (TH)

2. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu atau *Tax Allowance* (TA)
3. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal atau Masterlist.

Pada Tahun 2024 Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menetapkan target sebanyak 30 badan usaha untuk kegiatan Eksekusi Realisasi Investasi bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal, dengan capaian realisasi sebanyak 37 badan usaha (tercapai 123,33%).

10. Persentase Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target realisasi investasi nasional pada Tahun 2024, serta untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, telah dibentuk Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 121 tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Investasi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4, Satgas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden ini memiliki 5 (lima) tugas, yaitu:

- a) memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
- b) menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- c) mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;
- d) mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e) memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan

kementerian/lembaga/otoritas dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Indonesia.

Satuan Tugas Percepatan Investasi pada Tahun 2024 memiliki target sebanyak 18 penanganan kasus. Adapun realisasi penanganan kasus oleh Satgas Percepatan Investasi sebanyak 14 penanganan kasus (77,78%) pada Tahun 2024. Kinerja yang baik ini tidak terlepas dari hubungan yang baik antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kementerian/Lembaga terkait dan juga dengan Pemerintah Daerah terkait.

11. Persentase Perusahaan Investasi Besar yang Bermitra Dengan UMKM

Ruang lingkup kegiatan ini adalah antara lain:

- a) Memfasilitasi perusahaan investasi besar yang tidak memiliki kewajiban bermitra berdasarkan DNI untuk dapat bermitra dengan UMKM lokal/sekitar lokasi proyek;
- b) Investor asing dan dalam negeri berkolaborasi dengan pengusaha lokal yang ada di daerah termasuk UMKM;
- c) Keterlibatan UMKM sebagai supply chain dan supplier pada investasi yang ada di daerah;
- d) Tumbuh kembangnya UMKM naik kelas dengan adanya investasi di daerah;
- e) Tumbuhnya industri dan sektor riil di daerah;
- f) Terserapnya tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal atas kegiatan investasi di daerah;
- g) Menciptakan multiplier effect eksekusi realisasi investasi terhadap UMKM lokal, serta diharapkan seluruh UMKM nantinya dapat memiliki legalitas usaha dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kegiatan “Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM”, merupakan salah satu kegiatan yang mendukung KPI (*Key Performance Indicator*) dari Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang telah ada sejak Tahun 2020. Kegiatan terkait kemitraan UMKM di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terdapat di beberapa satuan kerja, antara lain di Kedeputan Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Kegiatan “Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM” di Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimaksudkan dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat naik kelas dengan cara bekerjasama secara langsung dengan perusahaan besar PMA dan PMDN di sekitar lokasi proyek. Pada Tahun 2024 kegiatan ini memiliki target 31 komitmen kerjasama usaha besar dengan UMKM. Dari target dimaksud telah dihasilkan komitmen kerjasama terhadap 31 usaha besar (100% dari target).

12. Persentase Percepatan Realisasi Proyek Investasi Yang Terkendala Dalam Pelaksanaannya

Eksekusi realisasi investasi proyek yang terkendala dalam pelaksanaannya pada Tahun 2024 dilaksanakan untuk proyek/rencana investasi dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) memiliki permasalahan yang terkendala selama lebih dari 1 tahun;
- (2) memiliki nilai rencana investasi di atas Rp 500 miliar; dan/atau
- (3) bernilai strategis, memberikan nilai tambah dan multiplier effect, berorientasi ekspor, substitusi impor serta menciptakan peluang penyerapan lapangan kerja yang besar.

Kegiatan eksekusi realisasi investasi proyek yang terkendala dalam pelaksanaannya pada Tahun 2024 tercapai sebesar 63,15% dari target 75%, dengan pembagian sebagai berikut :

I. Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Terkendala di Wilayah Barat (ERI Barat)

Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi terkendala di wilayah barat berada di wilayah Sumatera dan Jawa. Tahapan dalam kegiatan ini yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan melalui penggalian informasi dari perusahaan dan pihak terkait, menyusun *position paper* yang di dalamnya menggambarkan profil perusahaan maupun risalah permasalahan, serta melakukan kegiatan rapat/diskusi panel dalam rangka eksekusi penyelesaian permasalahan yang dialami pelaku usaha. Target kegiatan ERI Barat pada Tahun 2024 sebanyak 26 badan usaha, dengan realisasi sebanyak 26 badan usaha (tercapai 100%).

- II. Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Terkendala di Wilayah Timur (ERI Timur)
- Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi terkendala di wilayah timur berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Substansi pekerjaan ini adalah melakukan serangkaian upaya fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan proyek investasi yang dihadapi oleh perusahaan PMA/PMDN. Upaya ini dimulai dengan tahap persiapan dalam bentuk penetapan simpul/akar permasalahan yang menjadikan perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan untuk merealisasikan investasinya. Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan melalui sejumlah kegiatan kunjungan lapangan dan pertemuan koordinatif/pertemuan teknis (baik bersifat formal maupun non-formal) yang melibatkan stakeholders baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Lembaga non-pemerintah yang terlibat. Rangkaian kegiatan ini bermuara kepada penetapan solusi terbaik yang harus diambil oleh perusahaan maupun *stakeholders* terkait. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ERI Timur Tahun 2024 sebanyak 19 badan usaha, dengan realisasi sebanyak 5 badan usaha (tercapai 26,32%).

13. Persentase Proyek Yang Dipantau Perkembangan Realisasinya pada 38 Provinsi Dalam Rangka Dekonsentrasi

Dekonsentrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan/pengawasan realisasi penanaman modal pelaku usaha (PMA/PMDN Kewenangan Pusat) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan capaian realisasi penanaman modal dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Pada tahun 2024, terdapat 38 Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi.

Selaras dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, telah dilakukan pelimpahan kewenangan terhadap kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal. Pelimpahan kewenangan pemantauan realisasi penanaman modal tersebut diberikan kepada

DPMPTSP Provinsi dengan total realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.244.425.499 atau mencapai 87,46% (realisasi netto) dari total pagu sebesar Rp 14.000.000.000. Dana Dekonsentrasi tersebut telah dimanfaatkan oleh 38 Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah.

Lingkup urusan Dekonsentrasi yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut kegiatan Dekonsentrasi ini, Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menetapkan target capaian pelaku usaha yang dilakukan pengawasan dan target realisasi investasi untuk setiap Provinsi guna mendorong kinerja pengawasan yang lebih terstruktur dan terarah dengan tujuan akhir peningkatan realisasi investasi.

Data realisasi proyek pengawasan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi di 38 Provinsi tercantum tabel berikut:

Tabel 14 Data Realisasi Proyek Pengawasan dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi di 38 Provinsi

No.	Provinsi	Target 2024	Realisasi Proyek	% Realisasi
1	Kalimantan Tengah	26	27	103,85%
2	Kalimantan Selatan	28	21	75,00%
3	DKI Jakarta	144	145	100,69%
4	Sulawesi Utara	28	27	96,43%
5	Gorontalo	18	22	122,22%
6	Maluku	16	16	100,00%
7	Jawa Timur	70	68	97,14%
8	Sulawesi Tenggara	32	32	100,00%
9	Sumatera Barat	23	34	147,83%
10	Bengkulu	19	29	152,63%
11	Daerah Istimewa Yogyakarta	33	62	187,88%
12	Kalimantan Barat	41	31	75,61%
13	Kalimantan Utara	25	27	108,00%
14	Sumatera Utara	37	46	124,32%
15	Sumatera Selatan	34	59	173,53%
16	Bali	66	40	60,61%
17	Aceh	23	14	60,87%
18	Riau	39	68	174,36%
19	Kepulauan Bangka Belitung	26	26	100,00%
20	Kepulauan Riau	55	77	140,00%

21	Jawa Barat	88	130	147,73%
22	Jawa Tengah	79	260	329,11%
23	Nusa Tenggara Barat	55	55	100,00%
24	Banten	37	62	167,57%
25	Maluku Utara	34	31	91,18%
26	Papua Barat	14	15	107,14%
27	Lampung	35	34	97,14%
28	Nusa Tenggara Timur	39	79	202,56%
29	Sulawesi Barat	24	36	150,00%
30	Papua Selatan	12	12	100,00%
31	Kalimantan Timur	43	3	6,98%
32	Sulawesi Tengah	39	38	97,44%
33	Sulawesi Selatan	30	35	116,67%
34	Jambi	24	23	95,83%
35	Papua Tengah	12	12	100,00%
36	Papua Barat Daya	14	0	0,00%
37	Papua	12	6	50,00%
38	Papua Pegunungan	11	8	72,73%
Total		1385	1710	123,47%

Tabel 15 Capaian Realisasi Dana Dekonsentrasi TA 2024

NO	SATUAN KERJA DEKONSENTRASI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO		PENGEMBALIAN BELANJA		REALISASI NETTO		SISA ANGGARAN	
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Wilayah I										
1	060038 06501ED DPMPTSP Prov. Aceh	256.452.000	256.452.000	235.033.999	91,65	-	0,00	235.033.999	91,65	21.418.001	8,35
2	079001 06501ED DPMPTSP Prov. Sumatera Utara	330.171.000	330.171.000	327.867.495	99,30	(487.000)	(0,15)	327.380.495	99,15	2.790.505	0,85
3	080022 06501ED DPMPTSP Prov. Sumatera Barat	252.689.000	252.689.000	245.063.575	96,98	(1.761.000)	(0,70)	243.302.575	96,29	9.386.425	3,71
4	099001 06501ED DPMPTSP Prov. Riau	433.307.000	433.307.000	428.860.363	98,97	-	0,00	428.860.363	98,97	4.446.637	1,03
5	119002 06501ED DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan	424.365.000	424.365.000	378.249.600	89,13	(3.424.000)	(0,81)	374.825.600	88,33	49.539.400	11,67
6	120020 06501ED DPMPTSP Prov. Lampung	305.641.000	305.641.000	292.790.126	95,80	(2.296.200)	(0,75)	290.493.926	95,04	15.147.074	4,96
7	320082 06501ED DPMPTSP Prov. Kep. Riau	514.438.000	514.438.000	506.444.779	98,45	-	0,00	506.444.779	98,45	7.993.221	1,55
	Jumlah Dit. Wilayah I	2.517.063.000	2.517.063.000	2.414.309.937	95,92	(7.968.200)	(0,32)	2.406.341.737	95,60	110.721.263	4,40
	Wilayah II										
8	049001 06501ED DPMPTSP Prov. DI Yogyakarta	336.020.000	336.020.000	313.647.973	93,34	-	0,00	313.647.973	93,34	22.372.027	6,66
9	100098 06501ED DPMPTSP Prov. Jambi	313.175.000	313.175.000	278.550.600	88,94	(81.500)	(0,03)	278.469.100	88,92	34.705.900	11,08
10	139001 06501ED DPMPTSP Prov. Kalimantan Barat	504.421.000	504.421.000	460.374.298	91,27	-	0,00	460.374.298	91,27	44.046.702	8,73
11	140020 06501ED DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	450.415.000	450.415.000	449.323.356	99,76	(1.638.000)	(0,36)	447.685.356	99,39	2.729.644	0,61
12	159002 06501ED DPMPTSP Prov. Kalimantan Selatan	322.874.000	322.874.000	215.492.280	66,74	(701.100)	(0,22)	214.791.180	66,52	108.082.820	33,48
13	169001 06501ED DPMPTSP Prov. Kalimantan Timur	551.257.000	551.257.000	139.472.000	25,30	-	0,00	139.472.000	25,30	411.785.000	74,70
14	650101 06501ED DPMPTSP Prov. DKI Jakarta	499.137.000	499.137.000	473.515.000	94,87	-	0,00	473.515.000	94,87	25.622.000	5,13
	Jumlah Dit. Wilayah II	2.977.299.000	2.977.299.000	2.330.375.507	78,27	(2.420.600)	(0,08)	2.327.954.907	78,19	649.344.093	21,81
	Wilayah III										
15	029002 06501ED DPMPTSP Prov. Jawa Barat	659.567.000	659.567.000	653.296.650	99,05	-	0,00	653.296.650	99,05	6.270.350	0,95
16	039002 06501ED DPMPTSP Prov. Jawa Tengah	611.657.000	611.657.000	611.103.800	99,91	-	0,00	611.103.800	99,91	553.200	0,09
17	170029 06501ED DPMPTSP Prov. Sulawesi Utara	305.782.000	305.782.000	304.437.595	99,56	(1.528.200)	(0,50)	302.909.395	99,06	2.872.605	0,94
18	180015 06501ED DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah	415.121.000	415.121.000	385.887.200	92,96	(6.344.400)	(1,53)	379.542.800	91,43	35.578.200	8,57
19	190099 06501ED DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan	309.213.000	309.213.000	308.845.373	99,88	-	0,00	308.845.373	99,88	367.627	0,12
20	200028 06501ED DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara	302.119.000	302.119.000	300.829.000	99,57	-	0,00	300.829.000	99,57	1.290.000	0,43
21	290018 06501ED DPMPTSP Prov. Banten	303.458.000	303.458.000	300.422.000	99,00	-	0,00	300.422.000	99,00	3.036.000	1,00
	Jumlah Dit. Wilayah III	2.906.917.000	2.906.917.000	2.864.821.618	98,55	(7.872.600)	(0,27)	2.856.949.018	98,28	49.967.982	1,72
	Wilayah IV										
22	050016 06501ED DPMPTSP Prov. Jawa Timur	535.695.000	535.695.000	405.275.272	75,65	-	0,00	405.275.272	75,65	130.419.728	24,35
23	210023 06501ED DPMPTSP Prov. Maluku	302.177.000	302.177.000	297.826.698	98,56	-	0,00	297.826.698	98,56	4.350.302	1,44
24	220022 06501ED DPMPTSP Prov. Bali	508.329.000	508.329.000	244.151.386	48,03	(480.000)	(0,09)	243.671.386	47,94	264.657.614	52,06
25	230024 06501ED DPMPTSP Prov. Nusa Tenggara Barat	491.836.000	491.836.000	486.716.338	98,96	-	0,00	486.716.338	98,96	5.119.662	1,04
26	249002 06501ED DPMPTSP Prov. Nusa Tenggara Timur	413.770.000	413.770.000	411.385.841	99,42	-	0,00	411.385.841	99,42	2.384.159	0,58
27	250024 06501ED DPMPTSP Prov. Papua	242.697.000	242.697.000	211.396.000	87,10	-	0,00	211.396.000	87,10	31.301.000	12,90
28	280023 06501ED DPMPTSP Prov. Maluku Utara	426.785.000	426.785.000	393.494.000	92,20	-	0,00	393.494.000	92,20	33.291.000	7,80
29	690917 06501ED DPMPTSP Papua Selatan	248.394.000	248.394.000	217.256.000	87,46	-	0,00	217.256.000	87,46	31.138.000	12,54
30	690918 06501ED DPMPTSP Papua Tengah	216.973.000	216.973.000	105.854.000	48,79	-	0,00	105.854.000	48,79	111.119.000	51,21
31	690919 06501ED DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan	211.984.000	211.984.000	210.484.000	99,29	-	0,00	210.484.000	99,29	1.500.000	0,71
	Jumlah Dit. Wilayah IV	3.598.640.000	3.598.640.000	2.983.839.535	82,92	(480.000)	(0,01)	2.983.359.535	82,90	615.280.465	17,10
	Wilayah V										
32	260028 06501ED DPMPTSP Prov. Bengkulu	234.407.000	234.407.000	232.111.600	99,02	-	0,00	232.111.600	99,02	2.295.400	0,98
33	300015 06501ED DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung	301.229.000	301.229.000	300.067.700	99,61	-	0,00	300.067.700	99,61	1.161.300	0,39
34	310090 06501ED DPMPTSP Prov. Gorontalo	230.369.000	230.369.000	229.121.879	99,46	-	0,00	229.121.879	99,46	1.247.121	0,54
35	330082 06501ED DPMPTSP Prov. Papua Barat	272.262.000	272.262.000	233.180.072	85,65	-	0,00	233.180.072	85,65	39.081.928	14,35
36	340096 06501ED DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat	309.185.000	309.185.000	283.851.424	91,81	-	0,00	283.851.424	91,81	25.333.576	8,19
37	417745 06501ED DPMPTSP Prov. Kalimantan Utara	335.706.000	335.706.000	335.103.867	99,82	-	0,00	335.103.867	99,82	602.133	0,18
38	690916 06501ED DPMPTSP Papua Barat Daya	316.923.000	316.923.000	56.383.760	17,79	-	0,00	56.383.760	17,79	260.539.240	82,21
	Jumlah Dit. Wilayah V	2.000.081.000	2.000.081.000	1.669.820.302	83,49	-	0,00	1.669.820.302	83,49	330.260.698	16,51
	JUMLAH	14.000.000.000	14.000.000.000	12.263.166.899	87,59	(18.741.400)	(0,13)	12.244.425.499	87,46	1.755.574.501	12,54

D. Learning & Growth Perspective

14. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) di lingkungan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Nilai ini merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*).

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyampaikan data/informasi hasil PMRB kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara *online*.

15. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2024 mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja 71,10 dari target 80, atau memperoleh predikat BB.

16. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya di Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada Tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) untuk Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 4 dari target sebesar 4.

17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah proses penilaian terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dimana untuk Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan pada Tahun 2024 ini mendapat nilai sebesar 83,75 dari target sebesar 86.

18. Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada Tahun 2024 hasil nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 0% temuan (tidak ada temuan) dari target sebesar 5%.

Pemberian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam hal ini Kedeputan Bidang Pengendalian Penanaman Modal melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah, yaitu DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik yang merupakan kewenangan masing-masing daerah. DAK Nonfisik diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal.

Sasaran kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah:

1. Tercapainya target realisasi Penanaman Modal sesuai RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya
2. Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 20% dari tahun sebelumnya; dan
3. Meningkatnya kontribusi investasi dalam negeri.

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip keterpaduan, efisien, efektif dan akuntabel. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dapat membantu dalam mencapai realisasi investasi dengan upaya pengawasan, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. Untuk mendukung kegiatan ini maka Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan kegiatan ini.

Alokasi anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8Target Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran DAK Non Fisik 2024

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
1	Kabupaten Aceh Barat	585.147.000	175.544.000	14	321.832.000	230	87.771.000	8
2	Kabupaten Aceh Besar	631.908.000	189.571.000	20	347.551.000	324	94.786.000	11
3	Kabupaten Aceh Selatan	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	250	88.151.000	9
4	Kabupaten Aceh Singkil	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	149	60.604.000	5
5	Kabupaten Aceh Tengah	197.372.000	59.211.000	5	108.555.000	82	29.606.000	3
6	Kabupaten Aceh Tenggara	381.740.000	114.521.000	10	209.958.000	162	57.261.000	6
7	Kabupaten Aceh Timur	786.810.000	236.042.000	23	432.747.000	363	118.021.000	13
8	Kabupaten Aceh Utara	779.201.000	233.760.000	24	428.562.000	377	116.879.000	14

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
9	Kabupaten Bireuen	590.202.000	177.060.000	17	324.612.000	280	88.530.000	9
10	Kabupaten Pidie	592.730.000	177.818.000	17	326.003.000	278	88.909.000	10
11	Kabupaten Simeulue	409.605.000	122.881.000	10	225.284.000	151	61.440.000	5
12	Kota Sabang	596.521.000	178.955.000	15	328.088.000	225	89.478.000	8
13	Kota Langsa	400.317.000	120.095.000	11	220.175.000	179	60.047.000	7
14	Kota Lhokseumawe	609.159.000	182.747.000	19	335.039.000	290	91.373.000	11
15	Kabupaten Aceh Barat Daya	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	153	62.137.000	5
16	Kabupaten Aceh Jaya	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	153	60.604.000	5
17	Kabupaten Nagan Raya	575.036.000	172.510.000	16	316.271.000	270	86.255.000	9
18	Kabupaten Aceh Tamiang	620.534.000	186.159.000	17	341.295.000	274	93.080.000	10
19	Kabupaten Bener Meriah	630.644.000	189.192.000	15	346.856.000	232	94.596.000	8
20	Kabupaten Pidie Jaya	394.744.000	118.423.000	11	217.110.000	167	59.211.000	6
21	Kabupaten Asahan	290.678.000	87.203.000	10	159.874.000	150	43.601.000	5
22	Kabupaten Dairi	612.951.000	183.885.000	15	337.124.000	239	91.942.000	9
23	Kabupaten Deli Serdang	417.964.000	125.389.000	19	229.881.000	315	62.694.000	12
24	Kabupaten Karo	798.985.000	239.695.000	19	439.443.000	312	119.847.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
25	Kabupaten Labuhanbatu	381.740.000	114.521.000	11	209.958.000	184	57.261.000	7
26	Kabupaten Langkat	616.742.000	185.022.000	22	339.209.000	362	92.511.000	12
27	Kabupaten Mandailing Natal	399.388.000	119.816.000	11	219.664.000	177	59.908.000	6
28	Kabupaten Simalungun	630.644.000	189.192.000	23	346.856.000	357	94.596.000	13
29	Kabupaten Tapanuli Tengah	398.459.000	119.538.000	11	219.153.000	169	59.768.000	6
30	Kabupaten Tapanuli Utara	569.981.000	170.993.000	16	313.491.000	253	85.497.000	9
31	Kabupaten Toba	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	155	62.137.000	6
32	Kota Binjai	390.100.000	117.029.000	13	214.556.000	203	58.515.000	7
33	Kota Medan	355.089.000	106.526.000	16	195.300.000	265	53.263.000	9
34	Kota Pematangsiantar	398.459.000	119.538.000	11	219.153.000	184	59.768.000	6
35	Kota Padangsidimpuan	388.242.000	116.472.000	9	213.534.000	151	58.236.000	5
36	Kabupaten Pakpak Bharat	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	150	60.186.000	5
37	Kabupaten Humbang Hasundutan	631.908.000	189.571.000	15	347.551.000	237	94.786.000	8
38	Kabupaten Serdang Bedagai	609.159.000	182.747.000	20	335.039.000	315	91.373.000	11
39	Kabupaten Samosir	602.840.000	180.852.000	15	331.563.000	250	90.425.000	9
40	Kabupaten Batu Bara	604.104.000	181.231.000	18	332.258.000	284	90.615.000	10

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
41	Kabupaten Padang Lawas	394.744.000	118.423.000	10	217.110.000	153	59.211.000	6
42	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	383.598.000	115.079.000	10	210.980.000	159	57.539.000	6
43	Kabupaten Nias Utara	606.632.000	181.989.000	13	333.649.000	206	90.994.000	7
44	Kabupaten Nias Barat	381.740.000	114.521.000	9	209.958.000	141	57.261.000	5
45	Kota Gunungsitoli	392.886.000	117.865.000	10	216.088.000	148	58.933.000	5
46	Kabupaten Lima Puluh Kota	812.682.000	243.803.000	23	446.977.000	367	121.902.000	12
47	Kabupaten Agam	624.325.000	187.297.000	16	343.380.000	253	93.648.000	9
48	Kabupaten Kepulauan Mentawai	391.957.000	117.587.000	9	215.577.000	155	58.793.000	5
49	Kabupaten Padang Pariaman	824.857.000	247.456.000	20	453.673.000	324	123.728.000	11
50	Kabupaten Pasaman	623.061.000	186.917.000	14	342.685.000	233	93.459.000	8
51	Kabupaten Pesisir Selatan	830.945.000	249.282.000	22	457.022.000	352	124.641.000	12
52	Kabupaten Sijunjung	417.964.000	125.389.000	10	229.881.000	156	62.694.000	6
53	Kabupaten Solok Selatan	625.589.000	187.676.000	15	344.075.000	228	93.838.000	7
54	Kabupaten Tanah Datar	783.767.000	235.129.000	20	431.074.000	325	117.564.000	11
55	Kota Bukittinggi	401.245.000	120.373.000	12	220.686.000	181	60.186.000	6
56	Kota Padang Panjang	581.355.000	174.406.000	15	319.746.000	237	87.203.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
57	Kota Padang	638.227.000	191.468.000	29	351.026.000	480	95.733.000	18
58	Kota Payakumbuh	573.772.000	172.131.000	17	315.576.000	258	86.065.000	9
59	Kota Sawahlunto	194.586.000	58.375.000	4	107.023.000	69	29.188.000	2
60	Kota Solok	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	146	60.604.000	5
61	Kota Pariaman	397.530.000	119.259.000	10	218.642.000	158	59.629.000	6
62	Kabupaten Pasaman Barat	614.215.000	184.263.000	17	337.820.000	272	92.132.000	10
63	Kabupaten Dharmasraya	580.092.000	174.027.000	14	319.052.000	223	87.013.000	8
64	Kabupaten Solok	823.335.000	247.000.000	23	452.836.000	358	123.499.000	13
65	Kabupaten Bengkulu	623.061.000	186.917.000	26	342.685.000	403	93.459.000	14
66	Kabupaten Indragiri Hilir	595.257.000	178.576.000	19	327.393.000	302	89.288.000	11
67	Kabupaten Indragiri Hulu	410.534.000	123.159.000	14	225.795.000	219	61.580.000	8
68	Kabupaten Kampar	614.215.000	184.263.000	24	337.820.000	384	92.132.000	14
69	Kabupaten Kuantan Singingi	569.981.000	170.993.000	15	313.491.000	236	85.497.000	9
70	Kabupaten Rokan Hilir	395.673.000	118.701.000	15	217.621.000	235	59.351.000	8
71	Kabupaten Rokan Hulu	601.576.000	180.472.000	19	330.868.000	316	90.236.000	10
72	Kabupaten Siak	401.245.000	120.373.000	16	220.686.000	246	60.186.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
73	Kota Dumai	402.174.000	120.651.000	13	221.197.000	218	60.326.000	8
74	Kabupaten Natuna	618.006.000	185.401.000	15	339.905.000	239	92.700.000	9
75	Kabupaten Kepulauan Anambas	415.178.000	124.553.000	9	228.349.000	149	62.276.000	5
76	Kabupaten Karimun	634.436.000	190.330.000	18	348.941.000	298	95.165.000	10
77	Kota Batam	604.104.000	181.231.000	22	332.258.000	351	90.615.000	12
78	Kota Tanjung Pinang	616.742.000	185.022.000	19	339.209.000	302	92.511.000	10
79	Kabupaten Lingga	633.172.000	189.951.000	16	348.246.000	263	94.975.000	9
80	Kabupaten Bintan	626.853.000	188.056.000	15	344.770.000	249	94.027.000	9
81	Kabupaten Batanghari	602.840.000	180.852.000	18	331.563.000	296	90.425.000	10
82	Kabupaten Bungo	588.938.000	176.681.000	16	323.917.000	261	88.340.000	9
83	Kabupaten Kerinci	612.951.000	183.885.000	16	337.124.000	261	91.942.000	9
84	Kabupaten Merangin	630.644.000	189.192.000	15	346.856.000	244	94.596.000	9
85	Kabupaten Muaro Jambi	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	284	88.340.000	10
86	Kabupaten Sarolangun	582.619.000	174.785.000	15	320.442.000	248	87.392.000	9
87	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	586.411.000	175.923.000	17	322.527.000	267	87.961.000	10
88	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	628.117.000	188.434.000	16	345.466.000	254	94.217.000	9

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
89	Kabupaten Tebo	586.411.000	175.923.000	15	322.527.000	243	87.961.000	9
90	Kota Jambi	417.964.000	125.389.000	17	229.881.000	256	62.694.000	9
91	Kota Sungai Penuh	195.515.000	58.654.000	5	107.534.000	70	29.327.000	3
92	Kabupaten Lahat	634.436.000	190.330.000	23	348.941.000	358	95.165.000	13
93	Kabupaten Musi Banyuasin	569.981.000	170.993.000	23	313.491.000	366	85.497.000	12
94	Kabupaten Musi Rawas	405.889.000	121.766.000	14	223.240.000	223	60.883.000	8
95	Kabupaten Ogan Komering Ilir	777.679.000	233.303.000	24	427.725.000	382	116.651.000	13
96	Kabupaten Ogan Komering Ulu	200.623.000	60.187.000	6	110.343.000	92	30.093.000	3
97	Kota Palembang	390.100.000	117.029.000	19	214.556.000	295	58.515.000	10
98	Kota Prabumulih	388.242.000	116.472.000	12	213.534.000	185	58.236.000	7
99	Kota Pagar Alam	381.740.000	114.521.000	9	209.958.000	139	57.261.000	4
100	Kabupaten Banyuasin	585.147.000	175.544.000	22	321.832.000	347	87.771.000	12
101	Kabupaten Ogan Ilir	208.982.000	62.694.000	7	114.941.000	108	31.347.000	4
102	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	267	89.667.000	9
103	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	205	53.263.000	8
104	Kabupaten Bengkulu Selatan	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
105	Kabupaten Bengkulu Utara	596.521.000	178.955.000	16	328.088.000	259	89.478.000	9
106	Kabupaten Rejang Lebong	409.605.000	122.881.000	11	225.284.000	163	61.440.000	5
107	Kota Bengkulu	385.456.000	115.636.000	13	212.002.000	214	57.818.000	7
108	Kabupaten Kaur	588.938.000	176.681.000	14	323.917.000	215	88.340.000	7
109	Kabupaten Muko Muko	199.230.000	59.769.000	4	109.577.000	71	29.884.000	2
110	Kabupaten Bangka	615.478.000	184.643.000	18	338.514.000	286	92.321.000	10
111	Kabupaten Belitung	300.157.000	90.047.000	7	165.087.000	108	45.023.000	4
112	Kota Pangkal Pinang	303.316.000	90.995.000	9	166.824.000	140	45.497.000	5
113	Kabupaten Bangka Selatan	288.782.000	86.634.000	6	158.831.000	104	43.317.000	4
114	Kabupaten Bangka Tengah	587.674.000	176.301.000	16	323.222.000	257	88.151.000	9
115	Kabupaten Bangka Barat	409.605.000	122.881.000	11	225.284.000	174	61.440.000	6
116	Kabupaten Belitung Timur	618.006.000	185.401.000	17	339.905.000	274	92.700.000	9
117	Kabupaten Lampung Barat	415.178.000	124.553.000	11	228.349.000	172	62.276.000	6
118	Kabupaten Lampung Selatan	390.100.000	117.029.000	13	214.556.000	208	58.515.000	8
119	Kabupaten Lampung Tengah	580.092.000	174.027.000	23	319.052.000	356	87.013.000	12
120	Kabupaten Lampung Utara	395.673.000	118.701.000	13	217.621.000	205	59.351.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
121	Kabupaten Lampung Timur	788.332.000	236.499.000	28	433.584.000	462	118.249.000	16
122	Kabupaten Tanggamus	400.317.000	120.095.000	16	220.175.000	246	60.047.000	8
123	Kabupaten Tulang Bawang	580.092.000	174.027.000	15	319.052.000	241	87.013.000	9
124	Kabupaten Way Kanan	391.957.000	117.587.000	11	215.577.000	175	58.793.000	6
125	Kota Bandar Lampung	388.242.000	116.472.000	19	213.534.000	291	58.236.000	10
126	Kabupaten Pesawaran	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	238	88.151.000	9
127	Kabupaten Pringsewu	382.669.000	114.800.000	10	210.469.000	163	57.400.000	6
128	Kabupaten Mesuji	406.818.000	122.045.000	10	223.751.000	158	61.022.000	5
129	Kabupaten Tulang Bawang Barat	587.674.000	176.301.000	16	323.222.000	268	88.151.000	9
130	Kabupaten Pesisir Barat	386.385.000	115.915.000	10	212.513.000	164	57.957.000	6
131	Kabupaten Lebak	855.295.000	256.588.000	28	470.414.000	460	128.293.000	17
132	Kabupaten Pandeglang	815.726.000	244.717.000	31	448.651.000	502	122.358.000	18
133	Kabupaten Serang	630.644.000	189.192.000	22	346.856.000	351	94.596.000	13
134	Kabupaten Tangerang	417.964.000	125.389.000	16	229.881.000	257	62.694.000	9
135	Kota Tangerang	404.032.000	121.210.000	20	222.218.000	307	60.604.000	11
136	Kota Serang	381.740.000	114.521.000	15	209.958.000	237	57.261.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
137	Kota Tangerang Selatan	397.530.000	119.259.000	19	218.642.000	301	59.629.000	11
138	Kabupaten Bandung	798.985.000	239.695.000	34	439.443.000	543	119.847.000	19
139	Kabupaten Bekasi	292.574.000	87.772.000	12	160.916.000	188	43.886.000	7
140	Kabupaten Bogor	826.379.000	247.913.000	35	454.510.000	546	123.956.000	19
141	Kabupaten Ciamis	590.202.000	177.060.000	20	324.612.000	325	88.530.000	11
142	Kabupaten Cianjur	573.772.000	172.131.000	24	315.576.000	366	86.065.000	13
143	Kabupaten Cirebon	621.797.000	186.538.000	23	341.990.000	362	93.269.000	13
144	Kabupaten Garut	774.635.000	232.389.000	32	426.051.000	519	116.195.000	17
145	Kabupaten Indramayu	595.257.000	178.576.000	24	327.393.000	373	89.288.000	13
146	Kabupaten Karawang	398.459.000	119.538.000	17	219.153.000	271	59.768.000	9
147	Kabupaten Kuningan	596.521.000	178.955.000	21	328.088.000	333	89.478.000	11
148	Kabupaten Majalengka	585.147.000	175.544.000	24	321.832.000	366	87.771.000	13
149	Kabupaten Purwakarta	585.147.000	175.544.000	22	321.832.000	351	87.771.000	12
150	Kabupaten Subang	826.379.000	247.913.000	31	454.510.000	496	123.956.000	18
151	Kabupaten Sukabumi	777.679.000	233.303.000	31	427.725.000	500	116.651.000	17
152	Kabupaten Sumedang	612.951.000	183.885.000	22	337.124.000	347	91.942.000	12

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
153	Kabupaten Tasikmalaya	791.376.000	237.412.000	27	435.258.000	417	118.706.000	15
154	Kota Bandung	414.249.000	124.274.000	20	227.838.000	317	62.137.000	11
155	Kota Bekasi	415.178.000	124.553.000	19	228.349.000	300	62.276.000	10
156	Kota Bogor	415.178.000	124.553.000	16	228.349.000	253	62.276.000	9
157	Kota Depok	417.964.000	125.389.000	19	229.881.000	300	62.694.000	11
158	Kota Sukabumi	628.117.000	188.434.000	20	345.466.000	320	94.217.000	12
159	Kota Tasikmalaya	416.106.000	124.831.000	16	228.859.000	247	62.416.000	9
160	Kota Cimahi	394.744.000	118.423.000	14	217.110.000	211	59.211.000	8
161	Kota Banjar	585.147.000	175.544.000	14	321.832.000	231	87.771.000	8
162	Kabupaten Bandung Barat	399.388.000	119.816.000	16	219.664.000	242	59.908.000	8
163	Kabupaten Pangandaran	602.840.000	180.852.000	20	331.563.000	323	90.425.000	11
164	Kabupaten Banjarnegara	604.104.000	181.231.000	21	332.258.000	332	90.615.000	12
165	Kabupaten Banyumas	783.767.000	235.129.000	31	431.074.000	477	117.564.000	18
166	Kabupaten Batang	407.747.000	122.323.000	14	224.262.000	218	61.162.000	8
167	Kabupaten Blora	624.325.000	187.297.000	20	343.380.000	338	93.648.000	11
168	Kabupaten Boyolali	583.883.000	175.164.000	20	321.137.000	321	87.582.000	12

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
169	Kabupaten Brebes	583.883.000	175.164.000	24	321.137.000	391	87.582.000	13
170	Kabupaten Cilacap	612.951.000	183.885.000	25	337.124.000	397	91.942.000	14
171	Kabupaten Demak	583.883.000	175.164.000	22	321.137.000	343	87.582.000	13
172	Kabupaten Grobogan	583.883.000	175.164.000	21	321.137.000	326	87.582.000	11
173	Kabupaten Jepara	635.699.000	190.709.000	25	349.636.000	385	95.354.000	13
174	Kabupaten Karanganyar	634.436.000	190.330.000	22	348.941.000	340	95.165.000	13
175	Kabupaten Kebumen	604.104.000	181.231.000	22	332.258.000	347	90.615.000	13
176	Kabupaten Kendal	597.785.000	179.335.000	19	328.783.000	308	89.667.000	11
177	Kabupaten Klaten	588.938.000	176.681.000	19	323.917.000	305	88.340.000	11
178	Kabupaten Kudus	597.785.000	179.335.000	21	328.783.000	324	89.667.000	12
179	Kabupaten Magelang	638.227.000	191.468.000	22	351.026.000	351	95.733.000	13
180	Kabupaten Pati	410.534.000	123.159.000	15	225.795.000	244	61.580.000	9
181	Kabupaten Pekalongan	414.249.000	124.274.000	15	227.838.000	236	62.137.000	8
182	Kabupaten Pemalang	580.092.000	174.027.000	20	319.052.000	319	87.013.000	12
183	Kabupaten Purbalingga	592.730.000	177.818.000	18	326.003.000	291	88.909.000	10
184	Kabupaten Purworejo	798.985.000	239.695.000	28	439.443.000	453	119.847.000	15

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
185	Kabupaten Semarang	577.564.000	173.269.000	22	317.661.000	343	86.634.000	12
186	Kabupaten Sragen	582.619.000	174.785.000	16	320.442.000	254	87.392.000	9
187	Kabupaten Sukoharjo	401.245.000	120.373.000	17	220.686.000	260	60.186.000	10
188	Kabupaten Tegal	573.772.000	172.131.000	21	315.576.000	345	86.065.000	12
189	Kabupaten Temanggung	404.961.000	121.488.000	13	222.729.000	210	60.744.000	7
190	Kabupaten Wonogiri	612.951.000	183.885.000	19	337.124.000	306	91.942.000	10
191	Kabupaten Wonosobo	611.687.000	183.506.000	18	336.429.000	293	91.752.000	11
192	Kota Magelang	389.171.000	116.751.000	13	214.045.000	207	58.375.000	7
193	Kota Pekalongan	600.313.000	180.094.000	16	330.173.000	270	90.046.000	10
194	Kota Salatiga	355.089.000	106.526.000	12	195.300.000	189	53.263.000	6
195	Kota Semarang	406.818.000	122.045.000	20	223.751.000	309	61.022.000	11
196	Kota Surakarta	585.147.000	175.544.000	28	321.832.000	436	87.771.000	15
197	Kota Tegal	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	226	62.555.000	8
198	Kabupaten Bantul	791.376.000	237.412.000	29	435.258.000	454	118.706.000	17
199	Kabupaten Gunungkidul	614.215.000	184.263.000	18	337.820.000	280	92.132.000	10
200	Kabupaten Kulon Progo	792.898.000	237.868.000	26	436.096.000	403	118.934.000	15

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
201	Kabupaten Sleman	798.985.000	239.695.000	34	439.443.000	543	119.847.000	19
202	Kota Yogyakarta	355.089.000	106.526.000	15	195.300.000	234	53.263.000	8
203	Kabupaten Bangkalan	397.530.000	119.259.000	14	218.642.000	222	59.629.000	8
204	Kabupaten Blitar	595.257.000	178.576.000	22	327.393.000	349	89.288.000	13
205	Kabupaten Bojonegoro	406.818.000	122.045.000	18	223.751.000	277	61.022.000	9
206	Kabupaten Bondowoso	600.313.000	180.094.000	19	330.173.000	300	90.046.000	10
207	Kabupaten Gresik	388.242.000	116.472.000	17	213.534.000	280	58.236.000	10
208	Kabupaten Jember	193.193.000	57.957.000	8	106.257.000	128	28.979.000	5
209	Kabupaten Jombang	395.673.000	118.701.000	15	217.621.000	241	59.351.000	9
210	Kabupaten Kediri	611.687.000	183.506.000	24	336.429.000	372	91.752.000	14
211	Kabupaten Lamongan	569.981.000	170.993.000	25	313.491.000	402	85.497.000	14
212	Kabupaten Lumajang	417.964.000	125.389.000	14	229.881.000	230	62.694.000	8
213	Kabupaten Madiun	580.092.000	174.027.000	19	319.052.000	306	87.013.000	10
214	Kabupaten Magetan	394.744.000	118.423.000	12	217.110.000	182	59.211.000	6
215	Kabupaten Malang	609.159.000	182.747.000	27	335.039.000	439	91.373.000	15
216	Kabupaten Nganjuk	202.016.000	60.605.000	7	111.109.000	115	30.302.000	4

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
217	Kabupaten Ngawi	405.889.000	121.766.000	12	223.240.000	199	60.883.000	7
218	Kabupaten Pacitan	795.942.000	238.781.000	25	437.770.000	385	119.391.000	14
219	Kabupaten Pamekasan	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	289	88.340.000	10
220	Kabupaten Pasuruan	590.202.000	177.060.000	27	324.612.000	419	88.530.000	15
221	Kabupaten Ponorogo	581.355.000	174.406.000	22	319.746.000	346	87.203.000	12
222	Kabupaten Sampang	399.388.000	119.816.000	12	219.664.000	184	59.908.000	6
223	Kabupaten Sidoarjo	412.391.000	123.717.000	19	226.816.000	298	61.858.000	10
224	Kabupaten Situbondo	399.388.000	119.816.000	12	219.664.000	192	59.908.000	7
225	Kabupaten Sumenep	607.895.000	182.367.000	18	334.344.000	288	91.184.000	10
226	Kabupaten Trenggalek	413.320.000	123.995.000	13	227.327.000	207	61.998.000	7
227	Kabupaten Tuban	405.889.000	121.766.000	15	223.240.000	244	60.883.000	8
228	Kabupaten Tulungagung	401.245.000	120.373.000	14	220.686.000	232	60.186.000	8
229	Kota Blitar	406.818.000	122.045.000	13	223.751.000	199	61.022.000	7
230	Kota Kediri	597.785.000	179.335.000	20	328.783.000	312	89.667.000	11
231	Kota Madiun	415.178.000	124.553.000	14	228.349.000	225	62.276.000	8
232	Kota Mojokerto	599.049.000	179.714.000	18	329.478.000	287	89.857.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
233	Kota Pasuruan	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	159	57.679.000	5
234	Kota Probolinggo	392.886.000	117.865.000	14	216.088.000	213	58.933.000	8
235	Kota Batu	408.676.000	122.602.000	13	224.773.000	200	61.301.000	7
236	Kabupaten Kapuas Hulu	600.313.000	180.094.000	18	330.173.000	286	90.046.000	11
237	Kabupaten Ketapang	416.106.000	124.831.000	15	228.859.000	245	62.416.000	9
238	Kabupaten Sambas	417.964.000	125.389.000	14	229.881.000	216	62.694.000	7
239	Kabupaten Sanggau	414.249.000	124.274.000	12	227.838.000	199	62.137.000	7
240	Kabupaten Sintang	582.619.000	174.785.000	19	320.442.000	300	87.392.000	10
241	Kota Singkawang	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	263	89.667.000	8
242	Kabupaten Melawi	389.171.000	116.751.000	10	214.045.000	159	58.375.000	6
243	Kabupaten Kayong Utara	392.886.000	117.865.000	10	216.088.000	148	58.933.000	5
244	Kabupaten Kubu Raya	381.740.000	114.521.000	13	209.958.000	201	57.261.000	7
245	Kabupaten Barito Utara	400.317.000	120.095.000	10	220.175.000	152	60.047.000	6
246	Kabupaten Kapuas	191.335.000	57.400.000	5	105.235.000	87	28.700.000	3
247	Kabupaten Kotawaringin Barat	595.257.000	178.576.000	18	327.393.000	288	89.288.000	10
248	Kabupaten Kotawaringin Timur	383.598.000	115.079.000	13	210.980.000	208	57.539.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
249	Kabupaten Katingan	578.828.000	173.647.000	15	318.357.000	242	86.824.000	8
250	Kabupaten Seruyan	615.478.000	184.643.000	18	338.514.000	290	92.321.000	10
251	Kabupaten Lamandau	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	142	58.097.000	5
252	Kabupaten Gunung Mas	393.815.000	118.144.000	10	216.599.000	165	59.072.000	6
253	Kabupaten Pulang Pisau	391.029.000	117.308.000	9	215.067.000	152	58.654.000	5
254	Kabupaten Barito Timur	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	240	88.151.000	8
255	Kabupaten Banjar	597.785.000	179.335.000	19	328.783.000	294	89.667.000	10
256	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	415.178.000	124.553.000	12	228.349.000	193	62.276.000	7
257	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	192.264.000	57.679.000	4	105.746.000	65	28.839.000	2
258	Kabupaten Hulu Sungai Utara	416.106.000	124.831.000	10	228.859.000	162	62.416.000	5
259	Kabupaten Kotabaru	391.029.000	117.308.000	12	215.067.000	184	58.654.000	6
260	Kabupaten Tabalong	607.895.000	182.367.000	18	334.344.000	283	91.184.000	10
261	Kabupaten Tanah Laut	288.782.000	86.634.000	8	158.831.000	134	43.317.000	5
262	Kabupaten Tapin	577.564.000	173.269.000	15	317.661.000	236	86.634.000	8
263	Kota Banjarbaru	580.092.000	174.027.000	16	319.052.000	265	87.013.000	9
264	Kota Banjarmasin	577.564.000	173.269.000	20	317.661.000	317	86.634.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
265	Kabupaten Balangan	404.961.000	121.488.000	11	222.729.000	185	60.744.000	7
266	Kabupaten Tanah Bumbu	595.257.000	178.576.000	20	327.393.000	319	89.288.000	11
267	Kabupaten Berau	291.942.000	87.582.000	10	160.569.000	158	43.791.000	6
268	Kabupaten Kutai Kartanegara	610.423.000	183.126.000	24	335.734.000	382	91.563.000	14
269	Kabupaten Kutai Timur	412.391.000	123.717.000	16	226.816.000	264	61.858.000	9
270	Kabupaten Paser	284.991.000	85.497.000	8	156.746.000	133	42.748.000	4
271	Kota Balikpapan	620.534.000	186.159.000	28	341.295.000	435	93.080.000	16
272	Kota Bontang	618.006.000	185.401.000	20	339.905.000	323	92.700.000	12
273	Kota Samarinda	390.100.000	117.029.000	17	214.556.000	270	58.515.000	9
274	Kabupaten Penajam Paser Utara	168.200.000	50.460.000	5	92.510.000	77	25.230.000	3
275	Kabupaten Mahakam ulu	571.245.000	171.373.000	15	314.186.000	248	85.686.000	9
276	Kabupaten Bulungan	600.313.000	180.094.000	16	330.173.000	261	90.046.000	9
277	Kabupaten Nunukan	633.172.000	189.951.000	18	348.246.000	279	94.975.000	10
278	Kota Tarakan	191.335.000	57.400.000	6	105.235.000	93	28.700.000	3
279	Kabupaten Bolaang Mongondow	400.317.000	120.095.000	12	220.175.000	178	60.047.000	6
280	Kabupaten Minahasa	399.388.000	119.816.000	11	219.664.000	175	59.908.000	6

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
281	Kota Bitung	605.368.000	181.609.000	18	332.954.000	280	90.805.000	9
282	Kota Manado	583.883.000	175.164.000	24	321.137.000	377	87.582.000	13
283	Kabupaten Kepulauan Talaud	591.466.000	177.439.000	14	325.308.000	219	88.719.000	7
284	Kabupaten Minahasa Selatan	415.178.000	124.553.000	10	228.349.000	159	62.276.000	6
285	Kota Tomohon	398.459.000	119.538.000	12	219.153.000	176	59.768.000	6
286	Kabupaten Minahasa Utara	798.985.000	239.695.000	23	439.443.000	376	119.847.000	13
287	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	569.981.000	170.993.000	13	313.491.000	206	85.497.000	7
288	Kota Kotamobagu	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	153	57.679.000	5
289	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	381.740.000	114.521.000	8	209.958.000	130	57.261.000	4
290	Kabupaten Banggai	591.466.000	177.439.000	19	325.308.000	304	88.719.000	11
291	Kabupaten Banggai Kepulauan	605.368.000	181.609.000	13	332.954.000	210	90.805.000	7
292	Kabupaten Buol	391.957.000	117.587.000	9	215.577.000	146	58.793.000	5
293	Kabupaten Toli toli	401.245.000	120.373.000	11	220.686.000	168	60.186.000	5
294	Kabupaten Donggala	401.245.000	120.373.000	11	220.686.000	168	60.186.000	6
295	Kabupaten Morowali	411.462.000	123.438.000	15	226.305.000	234	61.719.000	8
296	Kabupaten Poso	386.385.000	115.915.000	11	212.513.000	174	57.957.000	6

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
297	Kota Palu	592.730.000	177.818.000	20	326.003.000	321	88.909.000	11
298	Kabupaten Parigi Moutong	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	157	57.679.000	6
299	Kabupaten Sigi	417.035.000	125.110.000	10	229.370.000	161	62.555.000	5
300	Kabupaten Banggai Laut	383.598.000	115.079.000	8	210.980.000	133	57.539.000	5
301	Kabupaten Morowali Utara	394.744.000	118.423.000	11	217.110.000	174	59.211.000	6
302	Kabupaten Bantaeng	403.103.000	120.930.000	12	221.708.000	197	60.465.000	7
303	Kabupaten Barru	590.202.000	177.060.000	16	324.612.000	253	88.530.000	9
304	Kabupaten Bone	592.730.000	177.818.000	20	326.003.000	319	88.909.000	12
305	Kabupaten Bulukumba	602.840.000	180.852.000	19	331.563.000	295	90.425.000	10
306	Kabupaten Enrekang	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	156	62.137.000	5
307	Kabupaten Gowa	573.772.000	172.131.000	19	315.576.000	306	86.065.000	11
308	Kabupaten Jeneponto	411.462.000	123.438.000	11	226.305.000	177	61.719.000	6
309	Kabupaten Luwu	391.957.000	117.587.000	11	215.577.000	171	58.793.000	6
310	Kabupaten Luwu Utara	387.313.000	116.193.000	11	213.023.000	173	58.097.000	6
311	Kabupaten Maros	381.740.000	114.521.000	12	209.958.000	197	57.261.000	7
312	Kota Palopo	406.818.000	122.045.000	11	223.751.000	170	61.022.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
313	Kabupaten Luwu Timur	411.462.000	123.438.000	13	226.305.000	206	61.719.000	8
314	Kabupaten Pinrang	601.576.000	180.472.000	16	330.868.000	257	90.236.000	9
315	Kabupaten Sinjai	612.951.000	183.885.000	16	337.124.000	262	91.942.000	9
316	Kabupaten Kepulauan Selayar	628.117.000	188.434.000	17	345.466.000	262	94.217.000	9
317	Kabupaten Sidenreng Rappang	416.106.000	124.831.000	11	228.859.000	170	62.416.000	6
318	Kabupaten Soppeng	417.035.000	125.110.000	9	229.370.000	155	62.555.000	5
319	Kabupaten Takalar	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	274	89.667.000	9
320	Kabupaten Tana Toraja	786.810.000	236.042.000	20	432.747.000	336	118.021.000	11
321	Kabupaten Wajo	638.227.000	191.468.000	20	351.026.000	312	95.733.000	11
322	Kota Pare-pare	624.325.000	187.297.000	19	343.380.000	294	93.648.000	11
323	Kota Makassar	583.883.000	175.164.000	28	321.137.000	436	87.582.000	16
324	Kabupaten Toraja Utara	779.201.000	233.760.000	20	428.562.000	332	116.879.000	11
325	Kabupaten Buton	403.103.000	120.930.000	10	221.708.000	154	60.465.000	6
326	Kabupaten Konawe	572.509.000	171.752.000	16	314.881.000	257	85.876.000	9
327	Kabupaten Kolaka	620.534.000	186.159.000	18	341.295.000	297	93.080.000	11
328	Kabupaten Muna	387.313.000	116.193.000	12	213.023.000	194	58.097.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
329	Kota Kendari	628.117.000	188.434.000	26	345.466.000	405	94.217.000	14
330	Kota Bau-bau	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	284	88.340.000	10
331	Kabupaten Konawe Selatan	611.687.000	183.506.000	17	336.429.000	260	91.752.000	9
332	Kabupaten Wakatobi	578.828.000	173.647.000	14	318.357.000	219	86.824.000	8
333	Kabupaten Kolaka Utara	415.178.000	124.553.000	10	228.349.000	160	62.276.000	5
334	Kabupaten Konawe Utara	569.981.000	170.993.000	16	313.491.000	243	85.497.000	8
335	Kabupaten Buton Utara	578.828.000	173.647.000	13	318.357.000	212	86.824.000	8
336	Kabupaten Konawe Kepulauan	355.089.000	106.526.000	9	195.300.000	136	53.263.000	5
337	Kabupaten Kolaka Timur	404.032.000	121.210.000	10	222.218.000	152	60.604.000	5
338	Kabupaten Muna Barat	575.036.000	172.510.000	14	316.271.000	220	86.255.000	8
339	Kabupaten Buton Tengah	408.676.000	122.602.000	9	224.773.000	152	61.301.000	5
340	Kabupaten Majene	635.699.000	190.709.000	15	349.636.000	230	95.354.000	8
341	Kabupaten Mamuju	402.174.000	120.651.000	11	221.197.000	174	60.326.000	6
342	Kabupaten Polewali Mandar	409.605.000	122.881.000	12	225.284.000	186	61.440.000	7
343	Kabupaten Pasangkayu	389.171.000	116.751.000	9	214.045.000	137	58.375.000	5
344	Kabupaten Mamuju Tengah	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
345	Kabupaten Gorontalo	618.006.000	185.401.000	19	339.905.000	294	92.700.000	11
346	Kota Gorontalo	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	212	62.555.000	7
347	Kabupaten Bone Bolango	387.313.000	116.193.000	11	213.023.000	169	58.097.000	6
348	Kabupaten Gorontalo Utara	411.462.000	123.438.000	10	226.305.000	165	61.719.000	6
349	Kabupaten Bangli	634.436.000	190.330.000	15	348.941.000	229	95.165.000	7
350	Kabupaten Buleleng	597.785.000	179.335.000	23	328.783.000	364	89.667.000	13
351	Kabupaten Gianyar	602.840.000	180.852.000	23	331.563.000	378	90.425.000	14
352	Kabupaten Karangasem	619.270.000	185.780.000	20	340.600.000	321	92.890.000	11
353	Kabupaten Klungkung	416.106.000	124.831.000	12	228.859.000	190	62.416.000	7
354	Kabupaten Tabanan	288.150.000	86.445.000	9	158.483.000	149	43.222.000	5
355	Kota Denpasar	582.619.000	174.785.000	24	320.442.000	387	87.392.000	14
356	Kabupaten Bima	405.889.000	121.766.000	11	223.240.000	180	60.883.000	6
357	Kabupaten Lombok Barat	585.147.000	175.544.000	20	321.832.000	312	87.771.000	11
358	Kabupaten Lombok Tengah	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	226	62.555.000	8
359	Kabupaten Lombok Timur	609.159.000	182.747.000	23	335.039.000	377	91.373.000	12
360	Kabupaten Lombok Utara	623.061.000	186.917.000	16	342.685.000	266	93.459.000	9

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
361	Kabupaten Alor	581.355.000	174.406.000	13	319.746.000	215	87.203.000	7
362	Kabupaten Belu	586.411.000	175.923.000	14	322.527.000	217	87.961.000	7
363	Kabupaten Ende	385.456.000	115.636.000	9	212.002.000	146	57.818.000	5
364	Kabupaten Flores Timur	588.938.000	176.681.000	14	323.917.000	218	88.340.000	7
365	Kabupaten Manggarai	612.951.000	183.885.000	17	337.124.000	261	91.942.000	9
366	Kabupaten Ngada	595.257.000	178.576.000	14	327.393.000	229	89.288.000	8
367	Kabupaten Sikka	585.147.000	175.544.000	13	321.832.000	217	87.771.000	7
368	Kabupaten Sumba Timur	582.619.000	174.785.000	15	320.442.000	233	87.392.000	8
369	Kabupaten Timor Tengah Selatan	415.178.000	124.553.000	11	228.349.000	166	62.276.000	6
370	Kota Kupang	388.242.000	116.472.000	14	213.534.000	219	58.236.000	8
371	Kabupaten Manggarai Barat	581.355.000	174.406.000	17	319.746.000	278	87.203.000	10
372	Kabupaten Manggarai Timur	397.530.000	119.259.000	9	218.642.000	147	59.629.000	5
373	Kabupaten Sabu Raijua	391.957.000	117.587.000	8	215.577.000	134	58.793.000	4
374	Kabupaten Malaka	383.598.000	115.079.000	9	210.980.000	141	57.539.000	5
375	Kabupaten Maluku Tenggara	590.202.000	177.060.000	13	324.612.000	219	88.530.000	8
376	Kabupaten Buru	625.589.000	187.676.000	14	344.075.000	226	93.838.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
377	Kota Ambon	403.103.000	120.930.000	14	221.708.000	223	60.465.000	8
378	Kabupaten Kepulauan Aru	193.193.000	57.957.000	4	106.257.000	72	28.979.000	2
379	Kota Tual	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5
380	Kabupaten Halmahera Tengah	387.313.000	116.193.000	12	213.023.000	190	58.097.000	6
381	Kota Ternate	606.632.000	181.989.000	18	333.649.000	298	90.994.000	10
382	Kabupaten Halmahera Timur	385.456.000	115.636.000	10	212.002.000	161	57.818.000	5
383	Kabupaten Halmahera Selatan	396.601.000	118.980.000	13	218.131.000	198	59.490.000	7
384	Kabupaten Halmahera Utara	417.035.000	125.110.000	12	229.370.000	188	62.555.000	7
385	Kota Tidore Kepulauan	620.534.000	186.159.000	15	341.295.000	236	93.080.000	8
386	Kabupaten Pulau Morotai	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	143	58.097.000	5
387	Kabupaten Jayapura	355.089.000	106.526.000	11	195.300.000	171	53.263.000	6
388	Kabupaten Kepulauan Yapen	385.456.000	115.636.000	9	212.002.000	138	57.818.000	5
389	Kabupaten Waropen	404.961.000	121.488.000	9	222.729.000	145	60.744.000	5
390	Kabupaten Fak Fak	355.089.000	106.526.000	9	195.300.000	132	53.263.000	5
391	Kabupaten Manokwari	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	147	58.097.000	5
392	Kabupaten Teluk Bintuni	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	211	53.263.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
393	Kabupaten Teluk Wondama	398.459.000	119.538.000	8	219.153.000	127	59.768.000	5
394	Kabupaten Kaimana	396.601.000	118.980.000	10	218.131.000	164	59.490.000	6
395	Kabupaten Sorong	413.320.000	123.995.000	10	227.327.000	164	61.998.000	5
396	Kota Sorong	633.172.000	189.951.000	20	348.246.000	320	94.975.000	11
397	Kabupaten Raja Ampat	398.459.000	119.538.000	12	219.153.000	179	59.768.000	6
398	Kabupaten Merauke	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	208	53.263.000	7
399	Kabupaten Asmat	382.669.000	114.800.000	11	210.469.000	164	57.400.000	6

3. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (di luar Dana Dekonsentrasi 38 Provinsi) berdasarkan revisi terakhir adalah sebesar Rp 108.766.452.000 (APBN-P TA 2024). Adapun Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 sebesar Rp 14.000.000.000. Sedangkan hingga 31 Desember 2024 realisasi anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp 107.491.622.075 atau mencapai 98,83% (realisasi netto). Sedangkan realisasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 12.244.425.499 atau mencapai 87,46% (realisasi netto).

Beberapa hal yang perlu dilakukan dan diantisipasi dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran diantaranya adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan yang melibatkan daerah pada awal tahun anggaran dan segera diinformasikan kepada DPMPTSP yang akan terlibat. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terprogram dan lebih sistematis sehingga lebih memperlancar pelaksanaannya pada tahun berjalan dan meminimalisir kegiatan yang tidak dapat terlaksana
- b. Masih adanya perubahan pejabat pengelola keuangan di daerah sehingga menghambat pencairan pelaksanaan kegiatan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang disajikan untuk menunjukkan keberhasilan maupun pencapaian strategis dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sebagaimana tindak lanjut amanat yang ditentukan dalam Pasal 29, 30 dan 31 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kerja (Penetapan Kinerja) dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM maupun Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020 - 2024 terdapat sasaran dan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM antara lain terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat *investment grade*. Berlandaskan kebijakan tersebut, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi semakin berperan penting dalam menunjang arah kebijakan dan strategi nasional.

Penilaian hasil akhir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian selama Tahun 2024 dengan mangacu pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020 - 2024 dan Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal selama Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap IKU Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk mencapai sasaran strategis, didapat kesimpulan bahwa secara umum kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sangat baik, karena keempat sasaran strategis sudah terpenuhi dengan capaian rata-rata IKU melebihi target yang telah ditetapkan (di atas 100%) atau mendapatkan kategori “sangat baik” (biru). Prestasi kinerja tersebut diperoleh atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berperan aktif dan berkomitmen untuk menjalankan semua kebijakan penanaman modal yang sudah menjadi kewenangannya.

2. Tindak Lanjut ke Depan

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah maka penting dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah. Hal ini mengingat banyaknya kegiatan yang akan terlaksana optimal dengan melibatkan segenap institusi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Untuk mendorong pemantauan terhadap kemajuan perkembangan realisasi proyek penanaman modal dan kegiatan memfasilitasi permasalahan perusahaan, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyempurnaan antara lain meliputi:

- 1) Pemantauan

Melakukan pendekatan secara intensif dengan sosialisasi tentang pemanfaatan sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atas Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS, sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode dan tahapan pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal.

- 2) Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi

permasalahan-permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi terhadap indikasi permasalahan perusahaan dapat diperoleh melalui analisis LKPM, pemantauan langsung maupun informasi atau pengaduan dari investor maupun asosiasi pengusaha. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan semua permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan dikoordinasi sehingga memberikan hasil yang lebih optimal terhadap investasi secara nasional.

3) Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait (instansi Pemerintah dan pemerintah daerah terkait) guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusaha KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Pernyataan Penetapan Kinerja Unit Organisasi Eselon I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuliot**
Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Bahlil Lahadalia**
Jabatan : **Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	6	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	79
		7	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar (%)	75
		8	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		9	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70
		10	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		11	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100
		12	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala dalam pelaksanaannya (%)	75

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		13	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	14	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (skala)	4
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86
		17	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5

Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 115.374.380.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	38.241.727.000
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	19.251.521.000
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	7.049.356.000
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	9.319.823.000
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	41.511.953.000
Total Anggaran Tahun 2024		115.374.380.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

LAMPIRAN II
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Joko Saptono**
Jabatan : Direktur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah I



Agus Joko Saptono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH I
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I (Rp Triliun)	223,1
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	2	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (indeks)	3,2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah I (%)	70
		4	Persentase pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko bagi investasi skala besar di Wilayah I (%)	75
		5	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		6	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70
		7	Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I	8	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah I (skala)	4
		10	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2023 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	38.241.727.000
Total Anggaran Tahun 2024		38.241.727.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah I



Agus Joko Saptono

LAMPIRAN III
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rita**
Jabatan : Direktur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah II



Rita

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH II
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II (Rp Triliun)	266,4
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah II (%)	85
		4	Persentase pelaksanaan pengawasanberusaha berbasis risiko bagi investasiskala besar di Wilayah II (%)	75
		5	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah II (skala)	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2023 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	19.251.521.000
Total Anggaran Tahun 2024		19.251.521.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah II



Rita

LAMPIRAN IV
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Qodir**
Jabatan : **Plt. Direktur Wilayah III**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**
Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Plt. Direktur Wilayah III



Abdul Qodir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH III
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III (Rp Triliun)	359,4
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	3	Persentase perusahaan yang dapat di fasilitasi dalam rangka penyelesain permasalahannya di Wilayah III (%)	100
		4	Persentase pelaksanaan pengawasanberusaha berbasis risiko bagi investasiskala besar di Wilayah III (%)	75
		6	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala di wilayah barat dalampelaksanaannya (%)	80
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah III (skala)	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah III TA 2023 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	7.049.356.000
Total Anggaran Tahun 2024		7.049.356.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Plt. Direktur Wilayah III



Abdul Qodir

LAMPIRAN V

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH IV

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPMPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yos Harmen**
Jabatan : Direktur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah IV



Yos Harmen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH IV
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Rp Triliun)	241,7
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	2	Indeks kepuasan pelaku usaha / penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah IV (%)	70
		4	Persentase pelaksanaan pengawasanberusaha berbasis risiko bagi investasiskala besar di Wilayah IV (%)	75
		5	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80
		6	Persentase percepatan realisasi proyek investasi yang terkendala di Wilayah Timur dalam pelaksanaannya (%)	70
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV	7	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah IV (skala)	4
		9	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Wilayah IV TA 2023 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	9.319.823.000
Total Anggaran Tahun 2024		9.319.823.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah IV



Yos Harmen

LAMPIRAN VI
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH V



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Soegiharto**
Jabatan : Direktur Wilayah V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah V



Ady Soegiharto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT WILAYAH V
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	1	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V (Rp Triliun)	148,7
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	2	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (indeks)	3,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah V (%)	100
		4	Persentase pelaksanaan pengawasanberusaha berbasis risiko bagi investasiskala besar di Wilayah V (%)	100
		5	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah V (skala)	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Wilayah V TA 2023 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	41.511.953.000
Total Anggaran Tahun 2024		41.511.953.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Yuliot

Pihak Pertama

Direktur Wilayah V



Ady Soegiharto